

U S T A D H

Melintasi Dunia Politik

Sepakat Untuk Tidak Sepakat



Dr. H. Cecep Suryana, M.Si
Deri Husen Abdullah, S.Pd
Eful Saefullah Nurul Fahmi, S.Pd
Hikmat Maulana, S.Ag
Sri Nur Hasanah, S.Sos



Gunung Djati Publishing

USTADZ
MELINTASI DUNIA POLITIK
“Sepakat Untuk Tidak Sepakat”

Oleh:

Dr. H. Cecep Suryana, M.Si

Deri Husen Abdullah, S.Pd

Eful Saefullah Nurul Fahmi S.Pd

Hikmat Maulana, S.Sos

Sri Nur Hasanah, S.Sos

Editor:

Asep Iwan Setiawan

GUNUNG DJATI PUBLISHING

2024

Pasal 44

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

USTADZ MELINTASI DUNIA POLITIK “Sepakat Untuk Tidak Sepakat”

Penulis:

Dr. H. Cecep Suryana, M.Si, Deri Husen Abdullah, S.Pd
Eful Saefullah Nurul Fahmi S.Pd, Hikmat Maulana, S.Sos,
Sri Nur Hasanah, S.Sos

Editor:

Asep Iwan Setiawan

ISBN: 978-623-5485-77-5

Penerbit: Gunung Djati Publishing

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan
Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution 105, Cibiru, Bandung, Jawa
Barat, Indonesia

<https://lp2m.uinsgd.ac.id>

Cetakan Pertama, Januari, 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sepakat Untuk Tidak Sepakat

“ Politik hampir semenarik perang dan sama berbahayanya. Dalam perang, anda hanya bisa dibunuh sekali, tetapi dalam politik berkali-kali”

PROLOG

Alhamdulillah, merupakan kata pertama yang selalu terucap sebagai ungkapan puji dan syukur atas rahmat-Nya yang selalu melindungi dan meneguhkan hati kita agar senantiasa berada di jalan-Nya. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi tentu tidak terlepas dari kuasa-Nya. Seiring perkembangan zaman maka semakin berkembang pula pemahaman yang lahir dari pembelajaran dalam seluruh kehidupan umat manusia, konteks kehidupan yang kini terus berjalan pun tetap harus diteguhkan dan didasarkan pada ajaran agama islam. Begitu pula halnya salah satu topik yang akan menjadi bahasan dalam buku ini yaitu mengenai politik dalam pandangan seorang ustadz.

Bermula dari pembelajaran dalam ruang akademik di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati lah buku ini hadir menjadi sebuah karya yang selesai dan diharapkan bisa menghadirkan manfaat bagi banyak orang, tidak hanya pembelajaran yang bisa diambil dari bacaan buku saja tetapi bagi para penulis ada juga pembelajaran yang dapat diambil dari proses penyusunan buku ini. Dengan demikian kami menghaturkan terimakasih kepada bapak Dr. H. Cecep Suryana M.Si yang telah senantiasa membimbing dan juga mengarahkan para penulis dalam menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Ustadz Melintas Dunia Politik “Sepakat Untuk Tidak Sepakat”.

DAFTAR ISI

PROLOG	i
DAFTAR ISI	ii
Bagian 1 Mari Mengenal Secerch Politik Ustadz	1
A. Mengenal Ustadz Sebagai Tokoh Agama.....	5
B. Konteks Sosial & Kultural Indonesia	7
C. Peran Ustadz dalam Komunikasi Politik.....	9
D. Latar Belakang dan Sejarah Peran Politik Ustadz.....	11
E. Peran Kepemimpinan Agama dan Politik dalam Masyarakat ..	15
Bagian 2 Warna-Warni Komunikasi Politik Ustadz Syhabuddin	18
A. Etika Komunikasi dalam Konteks Agama	19
B. Pesan dan Narasi Politik ustadz	22
Bagian 3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Politik Ustadz.....	26
A. Keinginan untuk Berpartisipasi.....	26
B. Pengakuan dari Masyarakat	35
C. Sifat Sosial dan Kebersamaan.....	40
Bagian 4 Dampak Komunikasi Politik Ustadz.....	46
A. Perubahan Sosial dan Politik melalui Ustadz.....	46
B. Pemetaan Ustadz Dalam Perubahan Sosial.....	54
C. Pengkultusan dan Benturan Peran Ganda Ustadz	62
D. Pro Dan Kontra Respon Masyarakat Terhadap Politik Ustadz	73
E. Kontroversi dan Tantangan Ustadz dalam Peran Politik.....	75
F. Respon Masyarakat Terhadap Pesan Politik Ustadz.....	83
Bagian 5 Studi Kasus atau Contoh Nyata	85
A. Ustadz dan Pengaruhnya dalam Pemilihan Umum	85

B. Peran Ustadz sebagai Mediator dalam Konflik Sosial Politik..	87
C. Keberhasilan dan Kegagalan Ustadz dalam Membawa Perubahan	89
D. Menjadi Ustadz yang Sukses dalam Membawa Perubahan	91
Bagian 6 Implikasi dan Relevansi.....	93
A. Implikasi Komunikasi Politik Ustadz Terhadap Masyarakat ..	93
B. Relevansi Model Politik Ustadz Dalam Politik Modern	101
C. Tantangan dan peluang bagi ustadz di politik dimasa depan	108
Bagian 7 Kesimpulan	146
DAFTAR PUSTAKA	148
DOKUMENTASI.....	154
PROFIL PENULIS	155

Bagian 1

01

Mari Mengenal Secercah Politik Ustadz

Sebuah paradigma lama dan menjadi tata nilai dalam masyarakat adalah buruknya “nilai politik”. Jika politik itu dikaitkan dengan politikus atau para pegiat sosial kemasyarakatan, maka itu sangat wajar dan sah-sah saja. Namun, jika dikaitkan dengan ustadz, ustadz, pendeta, dan ahli agama, maka seakan politik berubah menjadi haram dan akibatnya mereka tidak wajar bersentuhan dengan politik karena dianggap kotor dan penuh dusta.

Ustadz yang mencoba masuk ke ranah politik praktis akan mendapat catatan buruk dari masyarakat. Nilainya sebagai seorang ahli agama akan tercoreng. Tidak jarang ustadz yang masuk ke ranah itu, mendapat cacian dan bahkan ditinggalkan oleh umatnya.

Benarkah politik itu buruk? Islam sangat mementingkan politik. Setidaknya ada dua alasan yaitu *hirashah al diin* (menjaga agama), dan *siyashah al dunya* (mengatur bumi). Dalam sejarah tercatat bahwa Rasulullah, selain sebagai pemimpin Agama, negara, juga

sebagai ahli dalam berpolitik. Piagam Madinah adalah contoh politik Rasulullah yang amat hebat.

Rasulullah sebagai Nabi dan tokoh politik, sukses besar dalam menjalankan pemerintahan Islam. Dua suku, Aus dan Khazraj yang sudah berabad-abad bermusuhan berhasil dipersaudarakan, Kristen, Yahudi, Nasrani, dan bahkan kaum Pagan bisa hidup berdampingan damai dan tentram di kolong bumi Madinah. Hal ini bisa terjadi karena kepiawaian seorang politikus Islam yang berintegritas tinggi; santun, jujur, amanah, dan disiplin. Demikian halnya kepemimpinan sahabat dengan model khilafah.

Tidak boleh memisahkan dua kepentingan besar dalam Islam yaitu kepentingan menjaga agama dan kepentingan mengatur bumi. Sebagaimana tidak boleh memisahkan ustadz dengan perannya sebagai pewaris nabi yang wajib mengurus bumi Allah.

Masyarakat sebaiknya pandai dan mengetahui sejarah, bahwa Ustadz adalah Pewaris Nabi. Mereka mempunyai tugas yang mulia, yaitu menjaga agama dan memperjuangkan kebutuhan dan keadilan masyarakat, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para khalifah dan ustadz salaf.

Jika paradigma masyarakat seperti diatas tetap dipelihara, maka bukan tidak mungkin agama Islam akan rusak, mundur dan stagnan karena urusan itu

direkomendasikan kepada para politikus murni yang kurang paham akan nilai-nilai ajaran Islam. Masyarakat akan semakin tidak berdaya. Integritas yang mereka miliki tidak teruji karena kedangkalan pengetahuan agama mereka.

Ibnu Aqil Al Hanbali mengatakan bahwa politik adalah *maa kaana fi'lan yakunu ma'ahu al naasu aqraba ila al shalaah wa ab'ada an al fasaad, wa in lam yadha'hu al nabiyyi wa laa nazala bihi wahyun*. Politik adalah suatu upaya strategis untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, menjauhkan mereka dari kerusakan. Meski belum pernah diletakkan oleh Nabi dan tidak ada landasan wahyunya.

Islam menilai politik sebagai sebuah upaya dalam rangka menjaga agama dan kehidupan dunia. Kendati tidak ada aturan pasti dari nabi, namun dalam prakteknya membuahakan berbagai action cerdas dan menyejukkan. Nabi menyerahkan urusan kemaslahatan kepada umat-Nya *antum a'lamu bi umuuri dunyakum, kamu lebih tahu akan urusan dunia-mu*.

Beberapa bentuk pemerintahan yang pernah ada di belahan dunia adalah; teokrasi yaitu kepemimpinan yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Monarki, kepemimpinan berdasarkan keturunan atau kerajaan. Autokrasi, kepemimpinan kebal hukum. Demokrasi, kedaulatan ditangan rakyat, dan khilafah yaitu dipimpin oleh seorang

amirul mukminin untuk semua umat di seluruh dunia. Khilafah diyakini sebagai salah satu model pemerintahan yang paling bagus yang pernah ada. Namun, tidak bisa dipaksakan keberlakuannya karena setiap negara memiliki caranya sendiri

Indonesia memiliki ijtihad dalam memerankan “politiknya”. Pancasila dan Undang-undang dasar adalah sebuah wadah pemersatu bangsa. Seluruh aturan yang ada berdasarkan nalar yang baik dan tidak bertentangan dengan nilai Islam, tentu juga nilai dalam agama lain. Negara dengan jumlah penduduk, suku, bangsa, dan bahasa terbanyak di dunia, mampu membawa masyarakat yang damai, toleran, dan aman.

Sebaiknya, masyarakat yakin bahwa dengan memberikan mandat kepada ustadz dalam memainkan politikanya, negara akan aman, masyarakat akan makmur, damai dan sejahtera. Sebaliknya jika mandat itu dibebankan kepada orang yang tidak paham agama, maka praktek kolusi, nepotisme, dan korupsi semakin menjamur.

A. Mengenal Ustadz Sebagai Tokoh Agama

Ustadz merupakan salahsatu tokoh pemuka agama dimana sangatlah berpengaruh terhadap masyarakatnya. Terkadang masyarakat meyimpan segalanya dan mempercayai semuanya kepada seorang uastadz atau kiyai.

Ustadz Syehabuddin,,,,, beliau adalah seorang ustadz sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Faqih Dua Bandung beliau merupakan tokoh agama yang bisa dibilang tidak terlalu berikut campur dengan dunia perpolitikan. Dimana beliau fokus untuk mengajar santrinya dan mengisi pengajian ibu-ibu dan komunitas muda lainnya.

Seklias tentang beliau Ustadz Syehab yang sering dikenal panggilannya dengan Pak Ustadz. Pada tahun 2014 banyak santri Miftahul Huda al Faqih yang sekolah SMP dan SMA yang kemudian melanjutkan kuliahnya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Alumni dari Miftahul Huda Al Faqih Manonjaya yang sedang kuliah akan tetapi sudah tidak mengaji di pesantren lagi, sehingga kondisi ini memicu para asatidz Miftahul Huda Al Faqih untuk mengadakan pengajian khusus bagi alumni Miftahul Huda Al Faqih yang sedang mengenyam pendidikan tinggi.

Maka pada tahun itu tepatnya di bulan Agustus, diutuslah seorang ustadz dari Ponpes Miftahul Huda Al Faqih Manonjaya yang bernama Ustadz Syihabudin untuk melakukan survey lokasi di daerah Cibiru untuk dijadikan

pusat pendidikan agama bagi para alumni. Setelah melakukan survey yang cukup panjang maka pada tanggal 3 September 2014 berdirilah Miftahul Huda Al Faqih Dua yang dimotori oleh tokoh yang paling berpengaruh dalam pendiriannya adalah KH. Ahmad Syafi'i, Ummi Dede Fatihatul Makiyah mereka itu merupakan suami istri, Ummi Hj. Dali Mutiara dan Ustadz Syihabudin. Dalam peresmian tersebut dihadiri oleh Tokoh agama setempat, tokoh pemerintah dan termasuk yang hadir adalah dosen UIN Ustadz Abdul Hamid (alm) sebagai penceramah dalam rangka peresmian pesantren Al Faqih Dua.

Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Faqih Dua merupakan ponpes yang dinaungi oleh Yayasan Al Faqih Dua Bandung. Al Faqih Dua ini adalah ponpes yang mampu merangkul semua latar belakang pemahaman yang berbeda. Hal ini dibuktikan dan dicontohkan langsung oleh pimpinan pondoknya yaitu Ustadz Syihabudin yang memiliki latar belakang Nahdiyin dan istrinya dari Muhamadiyah. Bahkan mertua perempuan dari ustadz Syihabudin adalah ketua Aisyiah di Tasikmalaya, sehingga bagi Ustadz Syihabudin perbedaan dalam hal furu' bukanlah hal yang inti karena perbedaan dalam masalah fiqih sudah terjadi sejak zaman ustadz dahulu.

Maka perbedaan latar belakang pemahaman di kalangan santri bukanlah menjadi penghalang untuk ikut duduk bersama-sama dalam rangka membahas

problematika agama dan bangsa yang lebih besar daripada membesarkan perbedaan dalam masalah fiqih. Berdasarkan penjelasan dari ustadz Syihabudin beliau mengatakan bahwa santri terdiri dari Nahdhatul Ustadz, Persis, Muhamadiyah, Salafi, Tariqat, Kepercayaan dan ormas lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Ponpes Al Faqih Dua tidak berafiliasi dengan ormas manapun, sehingga Ustadz Syihabudin mempersilahkan kepada santrinya untuk beribadah sesuai mazhabnya masing-masing. Meskipun secara umum ustadz Syihabudin menyampaikan materinya berdasarkan ustadz-ustadz yang beliau pegang. Dari sisi fiqih beliau mengambil madzhab Syafi'i, Aqidah mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi dan untuk Tasawuf merujuk kepada Imam Ghazali adapun secara lebih singkat beliau mengajarkan paham yang di pahami oleh Nahdhotul Ustadz, meskipun demikian beliau mempersilahkan kepada santrinya untuk mengikuti paham yang ia yakini dalam mazhabnya.

Itulah sekilas perkenalan Ustadz Syehabudin selaku Narasumber yang membantu buku ini rampug sampai selesai.

B. Konteks Sosial & Kultural Indonesia

Berbicara tentang social dan kultural Indonesia sedikit gamabran menurut Pendapat Soekanto (2004: 3) menyatakan bahwa Sosio-Kultural adalah suatu wadah

atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dan kebudayaan. Dimana proses tersebut menyangkut tingkah laku manusia dan diatur olehnya, terjadi proses yang saling mengikat antara unsur-unsur kebendaan dan spiritual.

Berdasarkan pemikiran KHD, Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan dan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Kekuatan sosio-kultural menjadi proses 'menebalkan' kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun (memfasilitasi/membantu) anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki laku-nya untuk menjadi manusia seutuhnya.

Berdasarkan pemikiran KHD, Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan dan menjadi penguatan karakter masyarakat sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Kekuatan sosio-kultural menjadi

proses 'menebalkan' kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Semua itu bertujuan untuk menuntun (memfasilitasi/membantu) anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya.

C. Peran Ustadz dalam Komunikasi Politik

Setelah berbincang terkait komunikasi politik Ustadz Syehab memaparkan Peran Ustadz dalam Komunikasi Politik. Politik itu tergantung yang mengendalikan. Bagaimana peran ustadz itu sangatlah penting, karena ketika politik tidak ada yang memberikan arah seorang ustadz atau tokoh agama bagaimana kedepannya.

Pembicaraan tentang hubungan dakwah dengan politik merupakan sesuatu yang amat penting, karena keduanya merupakan faktor pendukung yang sangat diperlukan dalam rangka menuntun umat menuju tujuan hidupnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, karena sejak zaman Rasul hingga para Sahabatnya, Islam memegang kendali untuk mengatur aspek kemasyarakatan dalam kehidupan keseharian. Bahkan saat itu, sebagai seorang Rasul atau Khalifah yang mengajarkan Islam kepada umatnya, Rasul dan Sahabat juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.

Hubungan erat antara Islam dan politik sebagaimana telah ditunjukkan dalam keterlibatan nyata umat Islam dalam urusan-urusan politik, bukan sekedar penjelmaan realitas sejarah tapi juga penjelmaan dari ketentuan agama. Bahkan menurut Bernard Lewis, “Islam terkait dengan kekuasaan sejak awal kelahirannya, dari masa-masa formatifnya di zaman Nabi dan para khalifah sesudah Nabi wafat. Hubungan agama dan kekuasaan, umat dan masyarakat politik ini, dapat dilihat dalam al-Qur’an sendiri dan dalam teks-teks keagamaan yang lain yang merupakan sandaran bagi keyakinan umat Islam” (Syamsuddin, 2001). Pandangan ini menunjukkan bahwa sejarah dan ajaran agama sangat mendukung terciptanya keharmonisan antara dakwah dengan politik.

Politik akan mengatur tentang kenegaraan, sementara dakwah lebih dari sekedar itu. Ustadz yang memahami posisinya sebagai pelaksana risalah dakwah Rasulullah Saw. dalam menyebarkan ajaran agama Islam untuk menyeru umat kepada kebaikan dalam kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari dari segala perbuatan yang buruk, tercela, hina, dan segala jenis perbuatan yang tidak terpuji lainnya, yang termaktub dalam konsep amar makruf nahi mungkar. Ma'ruf ditafsirkan sebagai segala sesuatu perbuatan yang baik dari sudut pandang akal dan syariah. Lawannya adalah

munkar, yakni perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan akal dan syariah.

Dari sini kita dengan mudah dapat mengidentifikasi banyak perbuatan yang tergolong makruf atau tergolong munkar. Ibadah seperti salat, puasa, dan zikir jelas adalah perintah Allah SWT., dan manfaatnya pun dapat dijelaskan secara ilmiah. Menuntut ilmu, bekerja keras, disiplin, dan hidup hemat juga perintah agama dan sangat perlu untuk kepentingan individu dan masyarakat.

D. Latar Belakang dan Sejarah Peran Politik

Ustadz

Keterlibatan ustadz dalam aktivitas komunikasi politik merupakan bagian dari partisipasi politiknya untuk ikut menentukan arah kebijakan negara dan kebijaksanaan pemerintah guna mencapai cita-cita negara. Partisipasi ustadz memberikan nuansa positif terhadap tatanan kehidupan bernegara. Adanya partisipasi warga negaramenandakan bahwa mereka bersedia mendukung kebijaksanaan pemerintah dan, kepada dirinya sendiri dapat memperoleh kepuasan tersendiri karena telah ikut menjadi bagian dari kebijaksanaan itu. Berbagai bentuk partisipasi dapat dilakukan oleh warganegara, akan tetapi yang paling baik adalah yang tumbuh dari pribadi tanpa ada paksaan, serta dilakukan tanpa berambisi untuk memperoleh materi.

Secara tegas sejarah politik Islam tidak memberikan contoh tentang partai politik. Partai politik baru dikenal pada masa moden ini. Apa yang bisa kita cari adalah benih-benih partai politik yang telah dilakukan pada masa lampau khususnya “Islam awal.”

Peristiwa tsaqifah bani saidah misalnya yang dikenal sebagai cikal bakal politik Islam, bisa menjadi model munculnya partai politik dalam sejarah politik Islam. Kelompok ansar yang merupakan penduduk asli Madinah secara bersama-sama atau berkelompok merasa bertanggungjawab atas keberlangsungan negara Madinah yang telah didirikan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Kelompok ini semula memandang bahwa secara politis negara Madinah harus diteruskan dengan cara mencari pengganti Nabi sebagai khalifah di Madinah. Nabi tidak pernah memberikan petunjuk atas apa yang harus dilakukan apabila kelak nanti sahabat ditinggalkan Nabinya. Mereka bermusyawarah dan berkesepakatan bulat memilih Abu Ubaidah sebagai pemimpin pengganti Nabi Muhammad. Hal ini didasarkan kepada integritas Abu Ubaidah sebagai sahabat senior dan mumpuni dalam persoalan politik kenegaraan.

Sebelum Abu Ubaidah dibaiat kaum Anshar, Abu Bakar dan Umar datang dan menganulir kesepakatan yang dihasilkan. Mensikapi permintaan Umar ini kaum Anshar berselisih ada yang menerima dan ada yang menolak

bahkan mengancam akan tetap mempunyai pemimpin dari kaum Anshar meski telah dianulir oleh sahabat Abu Bakar dan Umar.

Namun demi persatuan dan kesatuan umat Islam saat itu, mayoritas kaum anshar menerima permohonan Umar yang pada akhirnya memilih Abu Bakar sebagai khalifah pasca meninggalnya Nabi. Alasan Umar, Abu Bakar adalah sahabat yang paling pantas untuk memimpin umat Islam saat itu. Demi kebersamaan akhirnya kaum Anshar dan Muhajirin membaiat Abu Bakar sebagai khalifah.

“Ketika dibaiat oleh kaum muslimin di tsaqifah bani saidah, Abu Bakar meminta kepada seluruh kaum muslimin, apabila mendapatinya kesalahan dan kekurangan untuk segera mengingatkan atau mengkritiknya. Hal ini karena Abu Bakar menyadari bahwa dirinya adalah manusia biasa yang diberi amanat kaum muslimin untuk memimpin. Tak ada salahnya kalau kaum muslimin melakukan kritik demi kebaikan bersama.”

Namun berbeda dengan Umar karena mengetahui keinginan dan harapan kaum Anshar, Khalid bin Walid dengan segala kelebihan dan kekurangannya diganti dengan Abu Ubaid yang dari Anshar. Ini adalah respon Umar atas aspirasi kaum anshar yang menginginkan ada ada rekrutmen kader dari kaum anshar.

Beberapa peristiwa politik yang terjadi pada zaman klasik bisa kita baca melalui tulisan-tulisan para pujangga politik muslim seperti Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun maupun Al-Mawardi dan Al-Farra. Tokoh-tokoh ini menjadi rujukan awal dalam sejarah politik di samping buku-buku sejarah klasik seperti Tarikh al-Umam wa al-Muluknya al-Thabari, Ibn Atsir, dan Sirah Nabawi-nya Ibn Hisyam.

Al-Mawardi misalnya dalam buku al-Ahkam al-Sulthaniyah memperkenalkan konsep Makzul, yang menurunkan imam (khalifah) apabila seorang pemimpin itu kedapatan melakukan maksiyat terhadap Allah. Ini mengandung maksud bahwa seorang pemimpin harus mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan umat dan agamanya.

Sementara Ibn Taimiyah yang hidup pasca al-Mawardi mengalami masa yang dilematis. Sebagai seorang intelektual muslim, Ibn Taimiyah menginginkan system ketatanegaraan yang ideal. Kasus pemilihan kepala negara (khalifah) tidak harus didasarkan pada berbagai kualifikasi yang terukur. Untuk itu beliau hanya mensyaratkan dua sifat yakni; sifat amanah dan sifat *quwwah*. Namun ide Ibn Taimiyah yang fleksibel ini susah diwujudkan karena terbentur dengan beberapa hal, di antaranya suasana pemerintahan yang sedang mengalami kemunduran.

E. Peran Kepemimpinan Agama dan Politik dalam Masyarakat

Peran Pemuka agama sangatlah penting untuk menjadi pemimpin Agama sekaligus politik masyarakat.

Agama terambil dari Bahasa A “Tidak “ gama “kacau” berarti agama tidak kacau. Justru dengan beragama kita tidak kacau justru meninggalkan agama menjadikan kekacauan. Itu semua sesuai dengan kenyataan bahwa diantara beragama itu adalah sholat bahkan dikatakan “Sholat itu ialah tiang agama” berarti ketika sholatnya runtuh berarti agamanya juga runtuh dan bisa jadi runtuh juga salahsatu sudut di masyarakat.

Oleh karena itu orang yang tidak beragama kemudian tidak sholat maka hancir kehidupannya hancur keberagamaannya dan hancur diamata masyarakat.

Selain itu bisa kita sebutkan agama itu sangatlah penting bagi tatanan masyarakat contoh lainnya dalam berkeluarga berumahtangga kalau tidak memakai agama maka akan dimenangkan oleh ego bukan dengan kebaikan. Tanpa agama orang hanya memikirkan haknya terpenuhi tanpa memikirkan kewajiban.

Segala sesuatu harus dilandasi dengan agama karena dengan agama dirimu akan bermasyarakat dengan baik akan dijauhkan dari kehancuran, akan dijauhkan dari rasa ingin merendahkan aka nada rem untuk berbuat sesuatu yang negative.

Sebagai salahsatu contoh dalam tatanan masyarakat banyak laki-laki yang tidak bertanggungjawab kepda istrinya. Kata nabi

“wahai laki-laki saling wasiatilah kepada istrimu kebaikan karena istrimu sebagai amanah titipan dari Allah”

Makanya harus dijaga dengan baik karena dia adalah amanah dari allah. Karena apabila kamu todak amanah maka akan datang kehancuran kepadamu.

Adapun politik di masyarakat penting sekali untuk membantu dan memberikan penjelasan yang lurus sesuai dengan ketentuan supaya membantu kebingungan masyarakat.

Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti: para Kyai, ustadz, pendeta, pastor dan lainlain. Para tokoh agama berperan penting dalam masyarakat karena menjadi panutan dan menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat, tarutama dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilu. Tokoh agama memiliki tugas dan peran yang khas yaitu: Menjadi panutan atau memberi teladan bagi umatnya, khususnya di tengah situasi masyarakat yang diperhadapkan dengan pemilu, disinilah peran tokoh agamadibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya ikut

berpartisipasi dalam pemilu sebagai bagian dari masyarakat yang demokratis.

Karena yang dilakukan oleh tokoh agama kepada masyarakat didasarkan pada tanggung jawab iman dan agama, karena tokoh agama juga merupakan bagian dari masyarakat. Tanggung jawab inilah yang kemudian mendorong tokoh agama untuk memberikan pendidikan politik, ceramah, dakwa, khotbah atau sosialisasi politik kepada masyarakat.

Akan tetapi dari pa ustadz sendiri tidak terlalu yang menggeborakan perna beliau dalam dunia politik karena masyarakat memiliki pilihannya masing-masing kita hanya memberikan arahan dan wadah untuk menampung ketika mereka membutuhkan. Karena dengan adanya peran tokoh agama masyarakat jauh lebih terbantu baik itu dari urusan agama maupun urusan politik.

Bagian 2

02

Warna-Warni Komunikasi Politik Ustadz Syehabuddin

“Sepakat Untuk tidak sepakat”

Ustadz Syehab menjadikan Sepakat untuk tidak sepakat itu motto hidupnya dalam segala kondisi. Kenapa harus sepakat tidak sepakat karena kita tidak boleh fanatic akan segala sesuai semua itu penuh warnanya. Baik di dunia masyarakat agama bahkan di dunia politik.

Berbicara tentang politik, politik banyak sekali warnanya politik berhasil tergantung pemimpin dan masyarakatnya sendiri. Selain itu tergantung siapa yang memegang kepemimpinan itu sendiri.

Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk dari berbagai kegiatan yang dilakukan partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan seperti turut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik baik secara langsung atau tak langsung, kegiatan memilih dalam pemilihan umum, duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, menghadiri kelompok diskusi dan

sebagainya. Tapi bagi pa ustadz sendiri pa ustadz tidak terlalu yang mendominasi sesua yang berbau pemerintahan karena pesantren al-faqih tidak membutuhkan dukungan pemerintah apalagi meminta donasi untuk fasilitas pesantren bahkan kebutuhan santri lainnya. Karena ketika sudah berkesinambungan dengan dunia politik pasti mereka juga menginginkan timbal balik syang sama entah santrinya harus memilih beliau sebagai caleg ataupun lainnya. Bahkan ketika kita mendapatkan uang dari caleg itu “Haram” kecuali dia sudah menjabat itu tidak menjadi masalah akan tetapi ketika masih calon itu tidaak boleh.

Begitulah warna-warni komunikasi politik zaman sekarang mau percaya kepada siapa lagi masyarakat, mau menitipkan amanah kepada siapa lagi , itulah yang jadi pertanyaan umum semuanya.

A. Etika Komunikasi dalam Konteks Agama

Komunikasi adalah suatu aktivitas manusia yang saling berinteraksi antara satu orang maupun lebih, konsep tentang komunikasi tidak hanya berkaitan dengan masalah cara berbicara efektif saja melainkan juga etika bicara. Dalam pandangan agama islam komunikasi memiliki etika, agar jika kita melakukan komunikasi dengan seseorang maka orang itu dapat memahami apa yang kita sampaikan.

Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang islami, yaitu komunikasi ber-akhlak al-karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlak al-karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis (sunah Nabi).

Semenjak memasuki era reformasi, masyarakat Indonesia berada dalam suasana merdeka, bebas bicara tentang apa saja, terhadap siapapun, dengan cara bagaimanapun. Hal ini terjadi, setelah mengalami kehilangan kebebasan bicara selama 32 tahun di masa Orde Baru. Memasuki era reformasi orang menemukan suasana kebebasan komunikasi sehingga tidak jarang cara maupun muatan pembicaraan bersebrangan dengan etika ketimuran, bahkan etika Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia.

Kemudian realitasnya, tidak sedikit perselisihan, percekocokan, permusuhan, dan pertengkaran muncul karena perkataan yang tidak terkontrol. Bahkan tidak sedikit pertumpahan darah mengerikan yang berawal dari pekerjaan lidah yang membabi buta. Perlu diketahui Allah Swt., tidaklah suka yang berlebih-lebihan, maka jika berkomunikasi atau berbicara, berbicaralah sewajar-wajarnya, yang mengandung dorongan atau motivasi dan

jangan berbicara bila hanya untuk menyinggung perasaan seseorang. Karena apa yang kita bicarakan baik maupun buruk semua itu akan kita pertanggung jawabkan di akhirat nanti. Islam memberikan perhatian khusus terhadap pembicaraan, bahkan dipandang salah satu perkara yang akan menyelamatkan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Pembicaraan dimaksud adalah pembicaraan yang beretika, sehingga proses komunikasi berjalan dengan baik serta terjalin hubungan yang harmonis antara komunikator dengan komunikan.

Komunikasi pada hakekatnya adalah kesamaan makna terhadap apa yang diperbincangkan. Dimana kesamaan bahasa yang digunakan dalam sebuah percakapan belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Artinya komunikasi efektif itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat, dan yang terpenting lagi adalah orang lain bersedia menerima paham atau keyakinan, melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan lain dari hasil komunikasi tersebut.

Dalam konteks komunikasi di masyarakat, ada dua kata yang dirasa perlu untuk dibicarakan disini yaitu etika dan komunikasi. Kata etika diartikan sebagai; 1). Himpunan asas-asas nilai atau moral (Onong Uchjana Efendi, 2000: 64). 2). Kumpulan asas: Nilai yang

berkenaan dengan akhlak, 3). Nilai mengenai benar dan salah yang dianut golongan atau masyarakat, 4). Norma, nilai, kaidah atau ukuran tingkah laku yang baik (Wursanto, 1991:27). Etika menyangkut persoalan tatasusila, tetapi ia tidak membuat seseorang lebih baik. etika hanya menunjukkan baik buruknya perbuatan seseorang.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah perilaku seseorang disampaikan dengan mengandung unsur islami mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat dalam bentuk hubungan manusia dengan tuhan (iman), sesama Manusia dan alam semesta .

B. Pesan dan Narasi Politik ustadz

Tidak banyak narasi yang harus seorang ustadz keluarkan atau paparkan tentang politik cukup ikutlah jadilah pemimpin politik yang sesuai dengan tuntutan agama bagaimanapun caranya disamping rintangan politik ustadz pasti banyak pengahsutnya.

Menjadi ustadz bukanlah hal yang mudah untuk terjun ke dalam dunia politik banyak tanggungjawabnya baik itu masyarakat maupun dunia luar bahkan santrinya sekalipun.

Tidak terjun kedalam dunia politik belum tentu tidak berpolitik. Karena setiap apa yang kita lakukan semuanya hamper berpolitik dalam kegiatan rumah tangga, mengatur santri dan masyarakat serta jamaah lainnya semua itu berpolitik tapi kita harus memposisikan politik yang baik seperti apa.

Dunia politik memang menyenangkan sekaligus menegangkan, seorang ustadz yang sudah terjun bahkan ikut serta dalam dunia politik harus benar-benar mengarahkannya dengan baik karena tanggungjawabnya bukan hanya dunia tapi akhirat juga.

“Kita harus cermat, teliti dan jangan begitu saja langsung di share ke orang lain. Lakukan tabayun atau ceck and receck terlebih dahulu, karena semala tahun politik ini, cukup banyak berita bohong/ hoax yang sengaja diproduksi dan sebar melalui media sosial oleh pihak tertentu. Untuk kita harus berani melawan Hoax.”

Bila kita perhatikan selama ini, ada kecenderungan bahwa ustadz akan dikenal masyarakat karena mereka memiliki kemampuan menyampaikan pesan-pesan karena menarik perhatian khalayak. Ini menjadi sebuah fenomena yang bisa berdampak pengaburan makna ustadz itu sendiri. Sebab seorang ustadz yang benar-benar menguasai ajaran Islam yang luas dan dalam, namun kurang mampu menyampaikan gagasan-gagasan kepada masyarakat, cenderung untuk dikenal. Bahkan banyak orang yang sesungguhnya berpotensi menjadi ustadz, akan tetapi

karena keterbatasan seperti ini, sehingga ilmu agama yang dia miliki tidak bisa disampaikan kepada umat, dan umat pun kurang mendapat manfaat daripadanya.

Sebaliknya bagi individu yang memiliki kemampuan retorika yang tinggi, apalagi disertai dengan guyonan atau candaan yang mengundang selera tawa bagi khalayak, ketika dia berceramah dalam acara-acara keagamaan di media elektronik, kecenderungannya akan lebih dikenal khalayak, meskipun ilmu agamanya masih amat terbatas.

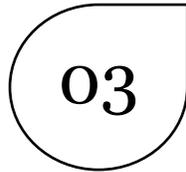
Oleh karena itulah, ustadz seharusnya tidak hanya sekadar memberikan fatwa, tetapi juga ikut menyertai dalam program pemerintah sejak perancangan sampai Banyak memang persepsi tentang cara untuk melaksanakan ibadah ajaran-ajaran Islam itu, karena adanya penafsiran dan cara pandang yang berbeda terhadap satu naskah. Namun apabila terjadi perbedaan dalam hal teknis pelaksanaan ibadah, maka ustadz harus dapat memberikan pemahaman kepada umat mengapa hal itu bisa terjadi. Ustadz tidak semestinya menganggap pendapatnya sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh umatnya, tugasnya lebih kepada menjelaskan dengan jujur dan benar, supaya umat dapat menimbang yang mana diantara sistem yang paling sah.

Hubungan antara ustadz dengan pemerintah mempunyai persamaan tugas yang sama yakni mewujudkan kesejahteraan umatnya. Untuk mewujudkan

hubungan baik antara ustadz dengan pihak pemerintah, diperlukan keadaan terbuka yang didasari dengan prasangka baik (husn al-zhann). Dengan demikian segala kekurangan, kebaikan maupun kebenaran dapat diterima. Ustadz harus dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, karena itu seorang ustadz harus menjadi pemimpin dalam masyarakat.

Intinya menjadi seorang ustadz dalam hal apapun mau itu social, politik dan budaya kita harus mampu memilah dan memilih mana yang baik mana yang positif. Dan ingat satu hala “ jadilah orang yang sepakat untuk tidak sepakat karena sepakatnya kita mempengaruhi segalanya dan tidak sepakatnya kita berarti menghargai pendapat satu sama lain.”

Bagian 3



Faktor-faktor yang

Mempengaruhi

Komunikasi Politik

Ustadz

A. Keinginan untuk Berpartisipasi

Keterlibatan Ustadz dalam aktivitas komunikasi politik merupakan bagian dari partisipasi politiknya untuk ikut menentukan arah kebijakan negara dan kebijaksanaan pemerintah guna mencapai cita-cita negara. Partisipasi Ustadz memberikan nuansa positif terhadap tatanan kehidupan bernegara. Adanya partisipasi warga negaramenandakan bahwa mereka bersedia mendukung kebijaksanaan pemerintah dan, kepada dirinya sendiri dapat memperoleh kepuasan tersendiri karena telah ikut menjadi bagian dari kebijaksanaan itu. Berbagai bentuk partisipasi dapat dilakukan oleh warganegara, akan tetapi yang paling baik adalah yang tumbuh dari pribadi tanpa

ada paksaan, serta dilakukan tanpa berambisi untuk memperoleh materi.

Partisipasi yang timbul atas kesadaran sendiri akan dilaksanakan secara professional dan menjunjung tinggi ketentuan serta mekanisme yang ada, menghilangkan kemungkinan munculnya keinginan untuk tujuan yang tidak seharusnya. Sedangkan munculnya partisipasi politik dalam pembangunan diakibatkan oleh adanya rangsangan/penyebab yang disebabkan oleh berbagai faktor. Weiner (dalam Gatara dan Said, 2007), menyebut ada lima faktor penyebab munculnya rangsangan partisipasi politik:

1. Adanya modernisasi di semua bidang yang menyebabkan masyarakat semakin banyak berpartisipasi;
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sehingga timbul pertanyaan mengenai siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik yang mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik;
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang;
4. Konflik antarkelompok pemimpin politik. Bila muncul konflik antarelit, yang dicari adalah dukungan rakyat;

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Hal ini sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Pada umumnya partisipasi politik para Ustadz khususnya dalam Pembangunan dilakukan dalam bentuk komunikasi politik dengan para pejabat pemerintah. Dalam waktu-waktu tertentu ada pertemuan antara Ustadz dengan pemerintah. Ustadz mengisi pengajian atau ceramah, yang mana dalam isi pembicaraan itu diikuti dengan materi yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan pembangunan. Walaupun hal ini dianggap masih ada keterbatasan-keterbatasan serta kemungkinan masih ada ketimpangan dalam pelaksanaannya, juga hasil yang dicapai belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Komunikasi politik Ustadz dalam pembangunan lebih bermuatan dukungan dan pernyataan kesetiaan kepada pemerintah, yang mengajak umatnya untuk terlibat aktif dalam pembangunan.

Pengaruh komunikasi politik Ustadz dalam pembangunan juga dalam kaitannya dengan masalah-masalah politik, sebenarnya akan dapat mencapai hasil yang menggembirakan bila dilakukan dengan sungguh-sungguh serta ada keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk menciptakan kesamaan pandangan terhadap sesuatu itu. Sebab Ustadz memiliki modal yang besar untuk

berkomunikasi secara efektif. Dalam disiplin ilmu komunikasi, proses penyampaian pesan-pesan dari komunikator kepada komunikan akan menjadi lebih efektif disebabkan setidaknya oleh dua faktor.

Pertama, ketika pesan-pesan yang disampaikan lebih banyak berorientasi kepada kepentingan komunikan. Sebagai makhluk sosial, manusia ingin memperoleh banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya dalam rangka menciptakan kondisi yang dapat menyebabkan dia bisa bertahan dalam hidupnya. Informasi yang diperoleh dari komunikator akan sangat diperhatikan bila itu sesuai dengan keinginannya dan memiliki manfaat dengannya. Petani, akan lebih senang mendengarkan informasi tentang bagaimana upaya meningkatkan hasil pertanian pada lahan yang sempit dan jenis pupuk yang sesuai dengan tanamannya. Informasi tentang pesawat terbang mungkin akan dia dengar, namun pembicaraan masalah pertanian yang lebih penting baginya.

Dalam hal ini, bila ada kesesuaian antara kepentingan yang sedang diperlukan oleh khalayak dengan apa yang dibicarakan, maka peluang untuk terciptanya kesamaan makna dalam berkomunikasi itu akan dapat tercapai. Khalayak enggan untuk terlibat dalam pembicaraan yang tidak penting baginya, apalagi kalau pembicaraan itu akan dapat menyinggung perasaannya atau dapat merugikan dirinya sendiri. Seorang lelaki pezina dan sudah terbiasa bermain-main dengan perempuan pelacur, tidak akan senang

membicarakan bagaimana hukumnya zina dalam agama, atau bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah penyakit sosial ini. Dia akan meninggalkan pembicaraan itu atau akan melakukan tindakan-tindakan kontradiktif atas maksud pembicaraan yang dilakukan tersebut.

Sebaliknya, seorang muslim yang beriman, yang masih menginginkan budaya dan norma-norma agama dilaksanakan dengan sempurna, memiliki semangat untuk mengikuti pembicaraan yang berusaha untuk memberantas penyakit sosial, bahkan dia akan rela berkorban dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan sebagai hasil dari pembicaraan tersebut. Penyakit sosial di masyarakat sudah cukup parah, seperti pergaulan bebas di kalangan remaja dan anak-anak. Penyakit seperti ini semakin marak karena Sebagian diantara masyarakat tidak peduli lagi, bahkan enggan untuk membicarakannya. Timbulnya penyimpangan perilaku atau kenakalan karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan (maladjustment) disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah karena orangtua, guru, pembimbing dan orang yang bergerak di bidang kesejahteraan anak dan remaja kurang mampu memahami perkembangan (psikis) dan pertumbuhan (pisik) anak serta aspek-aspek yang mempengaruhinya (Rahman, 2011).

Ketika seorang Ustadz senantiasa menyampaikan pesan-pesan moral untuk memberantas penyakit sosial di

kalangan remaja dan anak-anak, seharusnya didukung pula dengan tindakan orangtua, guru, dan lingkungan sekitarnya. Pesan Ustadz tidak akan banyak memberi pengaruh kepada pemberantasan kelakuan anak-anak yang tidak terpuji, manakala anak-anak dan remaja itu sendiri tidak senang dengan pembicaraan itu. Ceramah itu akan berhasil dan membawa pengaruh yang besar bila ada keinginan dari anak-anak dan remaja sendiri untuk berubah. Artinya, pesan-pesan harus diorientasikan untuk kepentingan khalayak dan khalayak merasakan bahwa pesan-pesan itu bermanfaat baginya.

Kedua, pihak yang menyampaikan pesan itu haruslah orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Pihak yang menyampaikan pesan disebut juga sebagai komunikator. Komunikator dapat mewarnai atau mengubah arah tujuan komunikasi, sehingga dia menjadi salah satu pemegang kunci berhasil atau gagalnya maksud dari suatu pembicaraan. Pada diri komunikator harus terdapat kredibilitas atau kepercayaan. Dia mesti memiliki ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tema pembicaraan atau validitasnya tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah pada diri seorang komunikator harus terdapat kepercayaan diri, bahwa dia mesti yakin terhadap keberhasilan proses komunikasi.

Khalayak memiliki sifat yang sangat heterogen, baik dari segi latar belakang ilmu pengetahuannya, budaya, agama, dan sosial ekonominya. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat

kesuksesan dalam proses komunikasi. Khalayak pada dasarnya ingin mengetahui informasi itu berdasarkan sumber yang valid atau terpercaya, jujur dan memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan keinginan khalayak. Misalnya pembicaraan tentang bagaimana menghindari terjangkitnya bibit-bibit penyakit, yang paling valid menyampaikannya adalah individu-individu yang berkecimpung dan memiliki ilmu dalam bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan sebagainya.

Manakala kita akan membahas masalah pertanian, sementara seorang komunikatornya adalah berlatar belakang sarjana sastra Inggris, maka hal ini kurang relevan. Bisa saja dia punya pengalaman dalam bidang pertanian, misalnya dia itu sering membaca buku-buku pertanian, atau memiliki ladang pertanian luas sehingga ada pengalamannya, dari aspek ini mungkin dia valid. Akan tetapi dari segi disiplin ilmu yang dia miliki, pembicaraannya tentang pertanian itu kurang valid, tidak linier, sehingga Tingkat kepercayaan atas isi pembicaraannya sangat rendah.

Kredibilitas Ustadz dalam menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak juga mesti mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya ketika pesan yang akan disampaikan kepada khalayak itu dikemas sedemikian rupa supaya lebih baik cantik, lalu disampaikan kepada khalayak dengan daya persuasi, maka khalayak akan tertarik untuk mengikuti makna pesan-pesan itu. Disamping itu, Ustadz juga memperhatikan

faktor lain dalam menyampaikan pesan. Cangara (2003) menyebut ada tiga cara untuk berhasil mengelola dan menyusun pesan-pesan secara efektif;

1. Pesan yang disampaikan harus dikuasai lebih dahulu, termasuk struktur penyusunannya yang sistematis;
2. Mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Untuk itu harus mempunyai alasan-alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan;
3. Memiliki kemampuan untuk membuat intonasi yang dapat menarik perhatian khalayak.

Bila kita perhatikan selama ini, ada kecenderungan bahwa Ustadz akan dikenal masyarakat karena mereka memiliki kemampuan menyampaikan pesan-pesan karena menarik perhatian khalayak. Ini menjadi sebuah fenomena yang bisa berdampak pengaburan makna Ustadz itu sendiri. Sebab seorang Ustadz yang benar-benar menguasai ajaran Islam yang luas dan dalam, namun kurang mampu menyampaikan gagasan-gagasan kepada masyarakat, cenderung untuk dikenal. Bahkan banyak orang yang sesungguhnya berpotensi menjadi Ustadz, akan tetapi karena keterbatasan seperti ini, sehingga ilmu agama yang dia miliki tidak bisa disampaikan kepada umat, dan umat pun kurang mendapat manfaat daripadanya.

Sebaliknya bagi individu yang memiliki kemampuan retorika yang tinggi, apalagi disertai dengan guyonan atau

candaan yang mengundang selera tawa bagi khalayak, Ketika dia berceramah dalam acara-acara keagamaan di media elektronik, kecenderungannya akan lebih dikenal khalayak, meskipun ilmu agamanya masih amat terbatas. Ketika dia banyak tampil di media massa dan semakin sering menjadi narasumber pada acara-acara televisi terkait dengan masalah keagamaan, kemudian dari sisi pakaian dia memakai busana muslim yang khas, justru masyarakat akan menganggapnya sebagai seorang Ustadz.

Jika saat ini diadakan poling pendapat atau survei khususnya bagi kalangan Islam dengan pertanyaan: *“siapakah Ustadz yang paling terkenal di Indonesia”, “kemana siapa Anda paling sering bertanya tentang agama Islam”,* atau *“Ustadz yang mana yang paling dekat dengan Anda”?* Jawabannya yang paling banyak bukanlah pada seorang Ustadz sungguhan yang memimpin Majelis Ustadz Indonesia atau pimpinan organisasi keagamaan Islam lainnya. Dapat dipastikan yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah para pengisi acara yang bernuansa keagamaan di stasiun televisi.

Keadaan seperti ini sebenarnya tidak salah sama sekali, dalam beberapa aspek ada juga manfaat dan ilmu yang diperoleh dari mereka. Akan tetapi, mereka yang dianggap Ustadz karena sering tampil di televisi itu, sesungguhnya belum teruji keUstadzannya. Beberapa dalil yang dia sampaikan tidak sah, akan tetapi tetap

dipergunakan karena dapat dijadikan bahan tertawaan atau lelucon. Tidak tertutup kemungkinan, akan ditemukan suatu soalan pada diri mereka yang kecenderungannya adalah negatif. Ini bisa menjadi contoh bagi khalayak, karena katanya Ustadz tertentu juga melakukannya. Misalnya, ada seorang Ustadz yang mengatakan bahwa seseorang boleh menikah tanpa saksi. Fatwa semacam ini bisa menjadi masalah besar, sebagian besar Ustadz lainnya menentang fatwa tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.

B. Pengakuan dari Masyarakat

Salah satu aktor komunikasi politik yang memiliki kredibilitas tinggi adalah Ustadz, karena dia memiliki sejumlah kelebihan yang mendapat pengakuan dari masyarakat. Ustadz ialah pemimpin umat Islam yang mempunyai pengetahuan agama yang luas. Dalam kajian komunikasi politik, Ustadz merupakan bagian dari opinion leader, yakni tokoh masyarakat yang berpengaruh. Dalam tataran konsep, Ustadz memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas. Bila kita merujuk kepada konsep bahwa Ustadz itu adalah pewaris nabi, maka Ustadz saat ini tentu memiliki cakupan ilmu yang lebih luas lagi, tidak hanya dalam ilmu agama saja. Akan tetapi menyangkut juga bidang-bidang lainnya.

Nabi Muhammad Saw. adalah seorang pemimpin pada masa pemerintahannya, dalam bidang pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada masa itu, termasuklah dalam bidang politik dan pemerintah. Sebagai pemimpin sekaligus sebagai individu, panglima perang dan kepala negara, Beliau melakukan perubahan-perubahan tatanan social kemasyarakatan dari segi pembinaan tauhid, moral, etika, serta mengatur cara berinteraksi dengan individu yang satu dengan yang orang lain. Beliau memiliki kesabaran, ketenangan dan keikhlasan yang luar biasa. Beliau juga mengatur tata pemerintahan, strategi berperang, dan berdiplomasi dengan pemimpin lain untuk mendakwahkan Islam.

Bercermin dari konsep ini, maka Ustadz juga dapat saja masuk mengikuti pembicaraan mengenai politik dan pemerintahan. Ustadz tidak boleh lagi hanya menguasai ilmu agama, akan tetap ia juga dapat memahami segala aspek yang berlaku dalam masyarakat. Ustadz perlu mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sebagaimana dulu Rasulullah pernah menerapkannya. Dengan pengetahuan tersebut, Ustadz mempunyai konsep yang baik untuk boleh mengarahkan masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Menurut Shihab (2003), ada empat tugas utama yang harus dijalankan Ustadz sesuai dengan tugas kenabiannya, yaitu:

1. Menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Dengan ilmu agama yang dipahami oleh para Ustadz, mendidik dan membina umat untuk mekaksanakan ibadah keseharian, utama dari aspek ibadah khusus, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Semua tata cara pelaksanaan ibadah khusus ini harus sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi.
2. Menjelaskan ajaran-ajaran Al-Quran untuk dapat dipahami umat. Banyak memang persepsi tentang cara untuk melaksanakan ibadah ajaran-ajaran Islam itu, karena adanya penafsiran dan cara pandang yang berbeda terhadap satu naskah. Namun apabila terjadi perbedaan dalam hal teknis pelaksanaan ibadah, maka Ustadz harus dapat memberikan pemahaman kepada umat mengapa hal itu bisa terjadi. Ustadz tidak semestinya menganggap pendapatnya sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh umatnya, tugasnya lebih kepada menjelaskan dengan jujur dan benar, supaya umat dapat menimbang yang mana diantara sistem yang paling sah.
3. Memutuskan perkara atau masalah yang dihadapi masyarakat. Perkara yang akan diputuskan oleh Ustadz harus berlandaskan kepada ajaran-ajaran

Islam. Ustadz harus konsisten melaksanakan ini karena akan berdampak pada kondisi masyarakat pada masa berikutnya. Dengan sikap yang adil, jujur, dan netral dalam memutuskan suatu perkara, Ustadz akan mendapat penghormatan dan kemuliaan di mata umat, sebab apa yang dia putuskan tentunya adalah demi kebenaran.

4. Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sebaik-baiknya dakwah itu adalah contoh teladan. Keteladanan Nabi Muhammad Saw. dalam seluruh aspek kehidupan sejak awal kenabiannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Nabi itu seorang yang jujur, ikhlas, terpercaya, dan benar. Namun demikian upaya untuk menjadikan beliau sebagai rujukan dalam kehidupan harus terus-menerus diupayakan secara konsisten. Ustadz sebagai pewaris nabi harus dapat menjadi contoh bagi umat. Sebelum disampaikan kepada umat, Ustadz harus melaksanakan ajaran Islam terlebih dahulu, termasuk oleh seluruh anggota keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Oleh karena itulah, Ustadz seharusnya tidak hanya sekadar memberikan fatwa, tetapi juga ikut menyertai dalam program pemerintah sejak perancangan sampai Banyak memang persepsi tentang cara untuk melaksanakan ibadah ajaran-ajaran Islam itu, karena

adanya penafsiran dan cara pandang yang berbeda terhadap satu naskah. Namun apabila terjadi perbedaan dalam hal teknis pelaksanaan ibadah, maka Ustadz harus dapat memberikan pemahaman kepada umat mengapa hal itu bisa terjadi. Ustadz tidak semestinya menganggap pendapatnya sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh umatnya, tugasnya lebih kepada menjelaskan dengan jujur dan benar, supaya umat dapat menimbang yang mana diantara sistem yang paling sah.

Hubungan antara Ustadz dengan pemerintah mempunyai persamaan tugas yang sama yakni mewujudkan kesejahteraan umatnya. Untuk mewujudkan hubungan baik antara Ustadz dengan pihak pemerintah, diperlukan keadaan terbuka yang didasari dengan prasangka baik (*husn al-zhann*). Dengan demikian segala kekurangan, kebaikan maupun kebenaran dapat diterima. Ustadz harus dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, karena itu seorang Ustadz harus menjadi pemimpin dalam masyarakat.

Ustadz dapat memberikan fatwa, pencerah umat, memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan dan dapat memberikan nasihat dan saran kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan itu dapat terarah, tidak bertentangan dengan agama dan dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih optimal bagi rakyat.

Ustadz memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Tanpa kehadiran Ustadz dalam kehidupan ini, orang akan menjadi hambar dan akan bertindak menurut hawa nafsunya. Inilah yang bisa jadi sebagai penyebab banyaknya individu yang melakukan tindakan tidak terpuji, misalnya korupsi, adalah karena bertindak menurut hawa nafsunya saja. Mereka tidak mahu mendengar nasihat Ustadz, bahkan menjauhkan diri dari jangkauan Ustadz. Pada diri sebagian orang, Ustadz dan nasihat Ustadz, hanya dijadikan sebagai topeng untuk melegitimasi perbuatannya. Dia justru mengarahkan Ustadz untuk kepentingan diri dan golongannya. Perbuatan buruk yang dia lakukan tetap saja terjadi, padahal dirinya mengaku dekat dengan Ustadz. Bila hal seperti ini ditemukan dalam aktivitas hidup keseharian, maka bukanlah Ustadz sesungguhnya yang dimaksud dalam kajian ini. Ustadz yang sesungguhnya adalah Ustadz yang mendapat pengakuan dari masyarakat, didengar dan dilaksanakan nasihatnya, dihormati dan dijadikan panutan dalam pelaksanaan ibadah, dan memberikan contoh dalam kehidupan keseharian.

C. Sifat Sosial dan Kebersamaan

Masyarakat Indonesia sangat mempercayai Ustadz. Dalam sistem komunikasi yang berlaku di Indonesia, kedudukan Ustadz adalah sebagai pemimpin informal.

Secara sosiologis, kedudukan Ustadz mendapat tempat yang baik di hati masyarakat. Menurut M. Munandar Soelaiman (Nurudin 2003), Ustadz atau kiyai mempunyai kekuatan memimpin pendapat dalam masyarakat karena terdapat dua perkara, yaitu: (1) mempunyai kemampuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi (*highly developed social sence*) dan (2) selalu melandaskan sesuatu kepada persetujuan bersama (*general consensus*).

Sebagai individu yang mempunyai kemampuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi, Ustadz menyadari apa yang terjadi dalam masyarakat, mengetahui keinginan masyarakat. Ustadz bergaul dan hidup bersama umatnya, sehingga segala bentuk peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat, tentunya dia ketahui dan sadari. Dengan kondisi seperti ini, Ustadz dapat mencari solusi atas perkara yang terjadi. Ustadz juga senantiasa melandaskan sesuatu kepada persetujuan bersama yang memiliki konsekwensi untuk kepentingan masyarakat itu tentunya.

Ustadz tidak akan mendominasi hal-hal yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan dan keduniaan lainnya. Dalam forum musyawarah antara warga misalnya, tentu Ustadz memberikan masukan-masukan yang memiliki manfaat bagi khalayak ramai. Sedangkan dalam hal keagamaan, Ustadz tetap konsisten terhadap ajaran Islam. Ustadz tidak akan terpengaruh

dengan budaya atau keinginan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ustadz memiliki keinginan kuat bahwa budaya dan hal-hal yang terdapat dalam masyarakat tetap berpedoman kepada ajaran agama.

Walaupun berada dalam kedudukan sebagai pemimpin informal, Ustadz tetap mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Khalayak akan memilih dan menerima sumber berdasarkan kepada kepercayaan mereka terhadap tahap pengetahuan sumber (Othman dan Ahmad, 2009). Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tahap kepercayaan masyarakat kepada Ustadz antara lain karena;

1. Ustadz mempunyai kapasitas ilmu agama yang tinggi. Sebagai bangsa yang banyak penganutnya beragama Islam, Ustadz menjadi tumpuan umat dalam mendapatkan ajaran Islam, yang membimbing umat ke arah yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As Sunnah. Ilmu yang dimiliki oleh para Ustadz dalam bidang agama, menjadi modal utama yang dia miliki untuk berkomunikasi dengan umat. Ustadz telah mendalami Islam sejak dari zaman kanak-kanak hingga dewasa. Ilmu agamanya sudah cukup luas dan dalam sehingga tingkat kepercayaan Ustadz kepada Ustadz menjadi tinggi.
2. Ustadz boleh menjadi tempat bertanya, contoh teladan, rujukan dan contoh dalam melaksanakan ajaran agama. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia memerlukan

contoh untuk dijadikan rujukan dalam hidupnya, baik dalam kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat lainnya. Ustadz sebagai pewaris nabi, mempunyai potensi yang tepat untuk menjadi contoh teladan dalam kehidupan. Ustadz dapat memahami teks dan konteks ajaran Islam yang telah diamalkannya. Demikian pula kepada para keluarganya, Ustadz telah mendidik keluarganya untuk berlaku baik sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Ada kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang diamalkan. Kesesuaian inilah yang dapat memberi contoh bagi umat. Sebab dakwah akan lebih berhasil apabila apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang diperbuat.

3. Tingkat kehidupan Ustadz yang sederhana dan tidak terpengaruh dengan kehidupan duniawi. Islam mengajar umat untuk meraih kesejahteraan dunia dan akhirat. Kehidupan Ustadz di Indonesia tergolong sederhana. Mereka dapat mencapai kesejahteraan dunia tanpa mengabaikan tujuan akhiratnya. Inilah yang menyebabkan Ustadz hidupnya sederhana dan jauh dari kemewahan dunia. Satu penyebab berlakunya masalah-masalah sosial dan penyakit sosial lainnya adalah karena terlalu mencari kehidupan duniawi. Ustadz yang hidupnya sederhana, cenderung untuk tidak terlibat dalam konflik dalam masyarakat,

terutama yang berkaitan dengan masalah harta dan kekuasaan.

4. Ustadz dapat menjadi moderator yang netral, adil, jujur, dan jernih dalam menilai sesuatu masalah. Bagi masyarakat Indonesia, Ustadz diletakkan sebagai salah satu sumber informasi dalam menyelesaikan suatu persoalan. Manakala ada persoalan yang terjadi di masyarakat, mereka boleh meminta penyelesaian kepada Ustadz, sebab dalam memandang suatu persoalan sangat objektif.

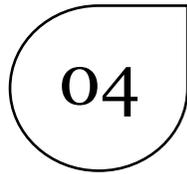
Ketika ada permasalahan yang dialami oleh umat, maka Ustadz harus tampil menengahi masalah ini secara adil. Proses pengambilan keputusan selalu didasari untuk mencari kebenaran sesuai dengan ajaran Islam. Masyarakat yang meminta nasihat kepada Ustadz juga senantiasa meyakini bahwa apa yang diputuskan oleh Ustadz merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah karena selaran dengan tuntunan Islam itu sendiri.

Karisma Ustadz sebagai pemimpin pendapat akan memberikan sumbangan besar bagi aliran komunikasi dari Ustadz kepada masyarakat atau sebaliknya antara sesama anggota masyarakat. Manakala Ustadz sudah mengatakan tidak untuk diadakan suatu perubahan sosial di masyarakat, maka masyarakat atau pengikutnya akan mengatakan yang serupa. Ketika ada persoalan yang terjadi di masyarakat, Ustadz bersikap bijaksana, bukan karena

membela Islam semata, akan tetapi lebih dari itu adalah untuk kebaikan bersama.

Misalnya, ketika banyak orang yang memprotes berdirinya rumah ibadah di suatu tempat. Pada dasarnya Ustadz dilibatkan untuk menengahi. Dalam hal ini, Ustadz tidak boleh hanya memihak kepada satu kelompok saja, misalnya kepada penduduk yang menolak saja. Kepada umat lain yang tidak seaqidah dengan Ustadz, juga harus tetap bersikap adil dan bijaksana. Kelebihan yang dimiliki oleh para Ustadz merupakan potensi yang seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk bekerjasama dalam menggalakkan pembangunan.

Bagian 4



Dampak Komunikasi Politik Ustadz

A. Perubahan Sosial dan Politik melalui Ustadz

Sosok Ustadz bagi masyarakat merupakan indikator penting dalam kelangsungan hidup keberagaman masyarakatnya. Ustadz tidak hanya sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan saja, namun juga sebagai tempat untuk mencurahkan berbagai keluh kesah dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Di desa biasanya Ustadz diminta solusi dari berbagai persoalan, seperti masalah keluarga, pendidikan, jodoh bahkan memilhkan waktu untuk memulai suatu pekerjaan. Tapi ada juga sebagai asumsi, bahwa penyebutan Ustadz cenderung disandarkan pada dunia pesantren yang berbasis tradisional dan NU.

Karena kemampuan agamanya yang cukup tinggi, maka Ustadz ditempatkan sebagai sosok “guru” baik dalam ilmu bathin (*esoteric*) maupun ilmu zhahir (*eksoterik*).

Jika dilihat dari sejarahnya, bahwa gelar Ustadz memang tidak mudah untuk didapat. Dalam bahasa Jawa gelar Ustadz memiliki asal usul dalam tiga jenis yang berbeda. *Pertama:* Ustadz merupakan gelar kehormatan bagi sesuatu yang dianggap keramat, *kedua:* gelar kehormatan untuk orang yang sudah tua, *ketiga:* gelar untuk seorang yang ahli agama Islam/memiliki pesantren dan mengajar kitab klasik. (Zamaksari Dhofier, 1982) Meskipun dalam perkembangan selanjutnya gelar Ustadz mulai melebar dan dapat dimiliki siapapun selama masyarakat setempat mau mengakuinya dan sang Ustadz bisa memenuhi kriteria sebagai sosok Ustadz apalagi mampu menjangkau apa yang tak terjangkau oleh orang awam.

Kedudukan sosial Ustadz dianggap cukup tinggi, sehingga Ustadz termasuk elit agama dan tokoh agama yang eksistensinya selalu diperhitungkan. Sebagai tokoh agama, Ustadz berada dalam posisi yang memiliki kharisma akibat hubungan strata social yang tetap dipertahankan dalam komponen masyarakat. Suzanne Keller memosisikan tokoh sebagai elit penentu sekaligus sebagai obyek sosial, sehingga berada dalam kondisi tiga hal: *pertama*, mempunyai wewenang dan pengambil keputusan, *kedua*, sebagai pendukung kekuasaan moral, dan *ketiga*, sebagai orang yang terkenal, berhasil dan berderajat. Maka seorang tokoh dituntut untuk berhasil dalam mengembangkan suatu citra umum yang

memudahkan hubungan timbal balik yang bersifat simbolis antara tokoh agama dengan masyarakat. Tokoh agama dapat juga ditempatkan sebagai kolektif model dan cermin dari ambisi, harapan dan pergolakan masyarakat.

Kajian dan penelitian tentang sosok dan peran Ustadz telah banyak dilakukan oleh para peneliti, seperti: Hiroko Horikosi (1978) yang membedakan Ustadz dengan Ustadz dan memandang Ustadz sebagai agen perubahan sosial, sehingga Ustadz banyak bermain pada tataran kultural. Pada akhirnya Ustadz ditempatkan sebagai pemelihara sistem, bukan pencipta sistem dan Ustadz sebagai perantara (*broker*) dalam menghubungkan Masyarakat modern dengan pertahanan sistem pertahanan tradisional. Maka Horikoshi memandang bahwa Ustadz menjadi tolak ukur dalam menunjukkan kewaspadaan terhadap prinsip otoritas, sehingga bila terjadi sebuah kemerosotan dalam hal apapun maka Ustadzlah yang menjadi penentram. (Suzanne Killer, 1995) Sementara Geertz (1960) menyoroti Ustadz sebagai makelar budaya (*cultural brokers*), demikian juga Martin Van Bruinessen (1995) yang menggandengkan kiprah Ustadz dalam dunia tarekat (persaudaraan mistik Islam). Zamakhsyari Dhofier (1982) juga mengkaji tentang pandangan hidup Ustadz dalam tradisi pesantren. Dan masih banyak lagi belakangan bermunculan kajian dan penelitian seputar

kiprah Ustadz terutama dalam pentas politik maupun sosial keagamaan.

Peran dominan Ustadz dalam proses perkembangan keagamaan tersebut kemudian membentuk sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat unsur yang tidak terpisahkan, saling mengandaikan, saling membutuhkan dan membangun suatu keseluruhan sehingga sampai pada keseimbangan yang cenderung untuk mempertahankan diri. Maka analisa teori fungsional Parson sangat relevan dengan menggunakan konsep relasional atau peranan, sebagaimana diuraikan oleh K. J. Veeger yang mengkaji teori fungsionalisme Talcot Parson dengan mengintrodusir ke dalam dua ciri khas, yaitu:

1. Konsep fungsi yang dimengerti sebagai sumbangan kepada keselamatan dan ketahanan system social.
2. Konsep pemeliharaan keseimbangan sebagai ciri utama dari tiap-tiap sistem sosial. (K.J. Veeger, 1993)

Maka dalam analisis Sosiologis, menurut Weber (1968) sebagai kacamata fakta sosial, kepemimpinan tokoh agama sesungguhnya adalah kepemimpinan kharismatik yang berporos pada personal leadership. Dalam konteks ini Ustadz adalah *patron* bagi umatnya (*client*) dalam sebuah relasi yang paternalistik. Kompetensi Ustadz dalam bidang agama menempatkannya sebagai pemegang otoritas suci agama. Fatwa dan nasehat Ustadz senantiasa dijadikan

sebagai preferensi sosial-politik yang dipatuhi umatnya. Bahkan dengan otoritas kuasa dan moral yang dimilikinya, Ustadz mampu menggerakkan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Perubahan sosial merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang ustadz. Komunikasi politik tersebut dapat mencakup berbagai aspek yang memengaruhi persepsi, keyakinan, dan tindakan masyarakat dalam hal politik. Seorang ustadz seringkali menggunakan komunikasi politik untuk membimbing umatnya dalam berpolitik dengan merujuk pada nilai-nilai agama dan etika.

Salah satu aspek yang dapat memengaruhi terhadap komunikasi politik dan perubahan sosial adalah pembentukan perspektif politik yang berbasis agama. Seorang ustadz dapat membentuk perspektif politik umatnya dengan menafsirkan isu-isu politik melalui sudut pandang nilai-nilai agama. Hal ini dapat memengaruhi cara masyarakat melihat dan menilai kebijakan politik serta memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Selain itu, ustadz juga dapat memobilisasi umatnya melalui komunikasi politik yang efektif. Dengan menggunakan media yang tepat, ustadz dapat

memobilisasi umat untuk terlibat dalam aktivitas politik, seperti pemilihan umum, kampanye, atau advokasi kebijakan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik umat dan memberikan dampak yang signifikan pada hasil politik.

Selain berpengaruh dalam mobilisasi politik umat, komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang ustadz juga dapat memengaruhi pemilihan umum. Ustadz yang memiliki otoritas moral dapat memengaruhi pemilih untuk mendukung kandidat atau partai tertentu berdasarkan pandangan politik yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh seorang ustadz dalam mempengaruhi keputusan politik masyarakat.

Pengembangan Kepemimpinan Politik Ustadz merupakan konsep yang menunjukkan peran penting seorang ustadz dalam dunia politik. Seorang ustadz yang aktif dalam komunikasi politik dapat menjadi pemimpin politik di tingkat komunitas atau bahkan nasional. Kepemimpinan politik yang dimiliki oleh seorang ustadz memiliki potensi besar untuk membawa perubahan yang signifikan dalam implementasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pada tingkat komunitas, seorang ustadz yang terlibat aktif dalam komunikasi politik dapat memengaruhi masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan

dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan keahlian dan pengaruhnya, seorang ustadz dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam komunitas.

Di tingkat nasional, kepemimpinan politik seorang ustadz dapat menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dapat membantu memperkuat dasar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Seorang ustadz yang terlibat dalam dunia politik juga dapat memberikan perspektif baru yang berlandaskan nilai-nilai agama yang dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat.

Salah satu peran penting seorang ustadz dalam dunia politik adalah dalam pembentukan agenda politik. Dengan keahlian dan pengetahuannya tentang agama, seorang ustadz dapat memengaruhi pembentukan agenda politik dengan menyoroti isu-isu yang dianggap penting berdasarkan pandangan agama. Hal ini dapat membawa perhatian pada masalah-masalah tertentu dan memengaruhi pembuat kebijakan untuk memperhatikan isu-isu tersebut.

Selain itu, komunikasi politik seorang ustadz tidak hanya terfokus pada kebijakan politik semata, tetapi juga

dapat merangsang partisipasi sosial umat dalam isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan mengutamakan nilai-nilai agama, seorang ustadz dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bersama.

Tidak hanya itu, seorang ustadz juga dapat berperan sebagai penengah dalam konflik politik yang terjadi. Dengan menggunakan wawasan agama, seorang ustadz dapat mempromosikan dialog dan perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai. Hal ini dapat membantu mengatasi konflik politik yang dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian dalam masyarakat.

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang ustadz memiliki peran yang penting dalam perubahan sosial masyarakat. Selain membentuk perspektif politik yang berbasis agama, komunikasi politik ustadz juga dapat memobilisasi umat serta memengaruhi keputusan pemilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, peran seorang ustadz dalam komunikasi politik tidak dapat dianggap sepele dan perlu dikelola dengan bijak untuk mencapai perubahan sosial yang positif dalam masyarakat.

B. Pemetaan Ustadz Dalam Perubahan Sosial

Ustadz dengan segala eksistensinya telah terjadi banyak pengembangan, bahkan pergeseran peran, baik dalam fungsi, tanggung jawab, kiprahnya, juga pada mindsetnya. Pada dasarnya kiprah Ustadz tidak hanya dilihat dari kegairahannya dalam mentransformasi nilai-nilai agama pada masyarakat, juga pada gigihnya dalam perjuangan social politiknya saja. Melihat sosok Ustadz, maka yang ada dalam benak kita adalah: *Pertama*, sebagai pendiri/pengasuh pondok pesantren, bahwa pesantren dapat dikatakan menjadi aspek yang hampir selalu ada dalam perkembangan masyarakat terutama yang menyangkut pengaruh Ustadz. (Sayfa Auliya Achidsti, 2015). Ustadz pesantren adalah mereka yang aktifitas kesehariannya mengajar ilmu-ilmu agama didalam pesantren, baik dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal dan program-program pesantren lainnya. Kedua, sebagai guru tarekat, sebagai pemimpin kelompok pengajian. Ketiga, sebagai pembela ummat, sebagai ustadz, dan lain-lain.

Dalam konteks Ustadz sebagai ustadz, Ustadz menjadi sosok sumber inspirasi bagi ummatnya, sehingga dalam totalitas seorang ustadz harus profesional. Profesionalisme merupakan aspek penting dalam menampakkan kualitasnya. Seorang ustadz awalnya muncul dari kalangan Ustadz dan santri, namun saat ini

ada kecenderungan dikalangan masyarakat umum bahwa profesi ini lebih terbuka, artinya walau bukan Ustadz ada peluang untuk menjadi seorang ustadz (ahmad sarbini, 2014).

Ustadz sekilas tampak homogen, jika dilihat secara seksama ternyata amat variatif. Perbedaan itu diakibatkan oleh banyak faktor. Misalnya, dari perbedaan mereka dalam mempersepsi dan memahami ajaran agama itu sendiri, lingkungan di mana masingmasing Ustadz itu hidup dan dibesarkan, kondisi ekonomi, dan juga faktor sosial politik. Muncul dan berkembangnya berbagai aliran keagamaan di berbagai tempat adalah bukti bahwa selalu adanya perbedaan pemahaman, persepsi atau sudut pandang. Di kalangan Ustadz misalnya, muncul istilah Ustadz fikih, Ustadz tasawuf dan sebagainya.

Berangkat dari asumsi tersebut, kemudian melahirkan peta konsep tentang perUstadzan, di mana Ustadz terpetakan dalam dua definisi, yakni: Ustadz karena “keturunan dan Ustadz karir”. Ustadz karena keturunan sebagaimana diungkapkan diatas merupakan sosok Ustadz yang secara genitis memang keturunan Ustadz besar baik ditingkat desa maupun dalam skala yang lebih besar, biasanya Ustadz keturunan sudah dipersiapkan sejak kecil, sehingga orientasi keilmuannya dari awal sudah diarahkan untuk menguatkan posisinya kelak ketika sudah siap menjadi Ustadz. Hal ini dibangun

agar masyarakat tidak kecewa ketika Ustadz tersebut telah tiada maka keturunannya telah siap dengan segala predikat Ustadz yang akan disandangnya. Kemudian Ustadz karir, secara genetis bukan keturunan Ustadz, namun karena memiliki ilmu agama yang cukup mapan dan dipupuk dengan bakat yang dimilikinya, maka dengan mudah ia memposisikan dirinya sebagai Ustadz.

Saat ini Ustadz karir ini banyak diminati oleh masyarakat, sehingga ada ungkapan yang cukup menarik dari sebgai masyarakat, bahwa untuk menjadi Ustadz cukup mudah yang penting punya pengetahuan agama, punya mushalla dan bisa ngajar ngaji. Peran keagamaan Ustadz di Indonesia cukup kompleks, yakni: *pertama*, sebagai pemimpin ritual keagamaan. Peran ini berangkat dari ketinggian tingkat relegiusitas masyarakat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, pelaksanaan ritual keagamaan merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat lebih melihat pada fungsi agama sebagai ikatan solidaritas yang memberikan ikatan simbolik. *Kedua*, sebagai pendiri atau pengasuh pondok pesantren, penggambarannya adalah banyak berdirinya pesantren yang tersebar disetiap pelosok di Indonesia, baik pesantren kecil maupun pesantren besar. Disadari ataupun tidak, ketika seseorang memutuskan memilih pondok pesantren, maka yang jadi pertimbangan pertama adalah Ustadz yang

mengasuh pesantren tersebut. Konsep kepemimpinan dalam pesantren adalah konsep mata rantai yang terus bersambung, artinya konsep tersebut menganggap sebagai sebuah aspek integral dalam kepranataan spiritual. Untuk itu santri akan sangat menjunjung tinggi berkah dari Ustadz. *Ketiga*, sebagai guru/pemimpin tarekat, para pemimpin tarekat merupakan Ustadz yang memiliki pengaruh besar dan memiliki jamaah cukup banyak.

Perkembangan selanjutnya, ketika bermunculan asumsi dari sebagian masyarakat yang mulai berani mengkritisi sosok Ustadz, bahwa Ustadz dahulu sangat berbeda dengan Ustadz sekarang. Dulu, masyarakat tidak akan berani melontarkan kalimat kritik, karena dianggap sangat tidak sopan. Namun saat ini ungkapan tersebut bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dilontarkan. Fenomena tentang keberanian ini menjadi layak dipertanyakan, apakah memang benar-benar telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sosok Ustadz atau dari masyarakatnya yang sudah mampu berfikir kritis tentang perkembangan kondisi sosialnya?. Di samping itu faktor perubahan sosial secara signifikan sangat berdampak cukup kritis dalam melahirkan persepsi yang berbeda dari sebelumnya, dimana studi tentang perubahan sosial akan melibatkan dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang menunjuk pada wilayah terjadinya perubahan sosial serta kondisi yang melingkupinya. Dimensi ini mencakup pula

konteks historis yang terjadi pada wilayah tersebut, sedangkan dimensi waktu meliputi konteks masa lalu (past), sekarang (present) dan masa depan (Nanang Martono, 2014).

Kemudian jika dianalisa lebih jauh maka akan muncul pertanyaan yang paling mendasar, dimanakah letak perbedaan tersebut? Bila akhirnya faktor keterlibatan Ustadz dalam dunia politik dianggap biangnya, bukankah Ustadz berpolitik bahkan terlibat dalam politik praktik itu sejak masa sebelum kemerdekaan telah banyak mewarnai percaturan dunia politik. Dalam konstelasi sejarah di Indonesia, Ustadz telah banyak melakukan pergerakan bahkan perjuangan, salah satunya melalui peran politiknya dengan mengusung berbagai partai Islam. Namun persoalannya jika dulu Ustadz berpolitik karena memiliki musuh bersama dan juga musuhnya cukup jelas yakni kolonialisme, kemudian berlanjut pada masa orde baru. Maka saat ini perjuangan Ustadz yang dihadapi bukan lagi musuh bersama ataupun musuh yang jelas. Ustadz dihadapkan pada dunia kapitalisme dan modernisme, yang sebagian kecil Ustadz menjadi bagian dari itu semua. Budaya tersebut cenderung menjadikan masyarakat menjadi individualistik karena mengagungkan teknologi dan rasionalitas, padahal tindakannya berada level irasional.

Demikian juga kapitalisme, karena ulahnya seringkali menghilangkan nilai-nilai solidaritas sosial yang sejak dulu telah tertanam dalam dalam masyarakat. Akhirnya, karena masing-masing individu sibuk mengurus diri sendiri maka semangat solidaritas menjadi terkikis. Arus modernisasi ini kemudian dibendung oleh tokoh-tokoh posmodernisme, sehingga melahirkan teori-teori posmodernisme, seperti: Antony Giddens, Foucault, Boudrillard dan lain-lain. Mereka mencoba menelanjangi fenomena masyarakat modern, sehingga studi posmodernisme cenderung dilihat sebagai studi yang bersifat reflektif. Boudrillard menilai bahwa masyarakat modern menjadi terjerumus pada masyarakat konsumtif. Masyarakat konsumtif memiliki kebutuhan-kebutuhan yang membawanya menuju pada objek yang memberinya kepuasan, walaupun pada akhirnya manusia tersebut tidak pernah merasa puas (Jean Baudrillard, 2013).

Manusia modern lebih tertarik untuk membeli merk, bukan dari nilai dan kemanfaatannya. Semuanya diarahkan pada konsep penyeragaman karena faktor gaya hidup dan citra yang diarahkan oleh iklan. Terjadinya perubahan social masyarakat disebabkan proses berlangsungnya transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang diikuti oleh berbagai implikasi di bidang ekonomi, geografis, budaya, dan psikologisnya, baik secara individu maupun kelompok. Kiprah seorang

Ustadz kemudian mau tidak mau harus terbentur dengan budaya masyarakat hedonis tersebut. Perjuangan Ustadz dituntut untuk lebih fleksibel dan akomodatif, namun juga diperlukan strategi dinamis agar dakwah agamanya bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat.

Secara historis, Ustadz menjadi bagian sosok agamawan yang posisinya cukup dipentingkan dalam konteks berbagai pertimbangan-pertimbangan menyangkut kebijakan, apalagi kebijakan yang melibatkan masyarakat, terutama bila berhubungan dengan kebutuhan gerakan-gerakan maupun mobilisasi. Maka Ustadz dinilai dan ditempatkan sebagai penentu maju dan tidaknya sebuah peradaban. Oleh sebab itu, kemajuan selalu identik dengan perubahan, kemudian muncul tudingan apakah Ustadznya terlebih dahulu yang harus berubah atautkah masyarakatnya. Tudingan tersebut kemudian ditempatkan dalam berbagai kepentingan ketika Ustadz selalu ditempatkan sebagai penjaga tradisi yang harus stagnan dan tidak dinamis, sehingga benturan-benturan perubahan sosial harus dihadapi atas nama agama. Atau sebaliknya, Ustadzlah yang harus berada di garda paling depan untuk menyesuaikan dengan berbagai pergolakan perubahan akibat tuntutan zaman.

Posisi tersebut menjadikan Ustadz berada dalam kondisi yang cukup dilematis. Zamakhsyari Dhofier menjembatani dilema tersebut, bahwa Ustadz memandang

tradisi dan modernitas sebagai dua entitas yang perlu bersatu untuk kebutuhan umat Islam menuju masa depannya, dengan berpegang pada azas *'al muhafadhoh 'alal qadimil ashlah wal ahdu min jadidin nafi'* (menjaga tradisi lama yang lebih baik dan menambah ilmu pengetahuan yang baru yang bermanfaat). (Zamakhsyari Dhofierbnbb, 2013). Hal tersebut berarti seorang Ustadz dituntut untuk memiliki strategi dakwah yang bijak, konsisten dan mampu merespon perkembangan zaman akibat perubahan sosial.

Modernisasi menjadi hal yang tidak terbantahkan dengan beberapa fakta yang telah ada di Indonesia. Fenomena ini menjadi babak tersendiri bagi para Ustadz, ketika Ustadz hanya diidentikkan sebagai pemangku masjid dan madrasah, pengajar dan pendidik, serta ahli dan penguasa hukum Islam, maka kemudian harus berhadapan dengan beragamnya pemahaman baru yang merubah pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya. Ustadz dituntut untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan baru dalam menyampaikan nilai-nilai agama sehingga tidak terjebak dalam kebekuan tradisi dan tidak terhanyut dalam arus modernisasi.

C. Pengkultusan dan Benturan Peran Ganda Ustadz

Sebagai pusat dakwah, Ustadz cukup memiliki banyak andil dalam membentuk kehidupan bermasyarakat, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah sejak zaman colonial belanda hingga saat ini. Demikian halnya dengan peradaban Indonesia modern, bahwa ujung tombak pembangunan peradaban melayu nusantara terdapat pada eksistensi Ustadz itu sendiri.

Ustadz menjadi aktor utama dari segala konsepsi sosial agamanya sekaligus menjadi institusi yang menjadi penyebarannya, sehingga Ustadz memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan sosial, politik dan ekonomi terutama bagi masyarakat lokal. Dapat dikatakan bahwa Ustadz beserta pengaruh di dalamnya menjadi pembentuk sistem dalam pola kehidupan masyarakatnya, selain itu juga dapat menjadi penentu budaya.

Penghormatan dan pengagungan terhadap Ustadz merupakan tradisi yang diwarisi oleh masyarakat tradisional, sehingga kemudian muncul pembelaan-pembelaan yang luar biasa dari masyarakat terutama santri terhadap pengamanaan sang Ustadz (Ali Usman, 2013) Sikap heroik tersebut sebagai bentuk bakti, khidmat dan loyalitas yang tinggi terhadap sang Ustadz.

Saat ini Ustadz tidak hanya dominan dalam perkembangan sosial keagamaan masyarakat, namun juga terlibat dalam politik dan birokrasi. Peran ganda ini seringkali berpengaruh besar terhadap manajemen waktu, tenaga bahkan dalam pemikiran Ustadz, sehingga baik Ustadz maupun masyarakat yang tidak siap akan mengalami keterkejutan dalam hal pemahaman kondisi sosialnya. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah: Bagaimana pergeseran peran Ustadz tersebut berlangsung sehingga melandasi motivasi Ustadz dalam pilihan peran gandanya?, Bagaimana para Ustadz yang terlibat peran ganda tersebut menjalankan fungsi sosialnya ditengah-tengah tuntutan masyarakat yang semakin kompleks? Dan Bagaimana Masyarakat menempatkan sosok Ustadz yang menjalankan peran ganda dalam sosial kultural masyarakat yang juga mengalami perkembangan dalam berbagai sektor?

Kehadiran Ustadz ini diharapkan akan dapat memberikan kesejukan dan kedamaian serta dapat mendinginkan panasnya arus politik dan menjadi *moral force* dalam kehidupan perpolitikan dan jalannya pemerintahan di Indonesia. Disisi lain adapula sebagian masyarakat yang mengaharapkan peran Ustadz atau elit agama berperan lebih signifikan agar dapat mengatasi persoalan-persoalan dan krisis yang terjadi di Indonesia.

Sebagian Ustadz punya peran ganda sejak dulu itu sudah ada, lalu apakah saat ini peran ganda tersebut kemudian menjadi persoalan?. Namun jika simbol Ustadz yang sakral dan sangat dihormati oleh umat menjadi hilang begitu saja karena terlibat dalam permainan politik dan kekuasaan itu menjadi persoalan, maka dalam politik Ustadz akan memainkan peran moral yang terkait dengan kepentingan umum ke berbagai saluran politik, baik langsung maupun tidak langsung.

Pada dasarnya realitas ini juga terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, Ustadz punya peran penting dalam perlawanan penjajahan terutama dalam pembentukan Negara Republik Indonesia, sehingga Ustadz menjadi simbol solidaritas perjuangan ummat. Maka dalam konstelasi sejarah di Indonesia dapat dipahami bahwa Ustadz dengan social politiknya tidak dapat dipisahkan secara ekstrem. Namun bagaimana manuver politik Ustadz saat ini? Apakah muatannya beriringan dengan perjuangan sebelumnya? Hal ini berlaku juga dalam percaturan perUstadzan di Indonesia, di mana adanya rekonstruksi politik telah menggeser garis perjuangan Ustadz seiring dengan perubahan dan perkembangan politik tanah air. Ustadz pun mulai merambah wilayah politik dengan segala manuver politik dukung- mendukung (legitimasi) yang seringkali dinamai dengan istilah memberi restu atau silaturahmi. Proses ini karena adanya

simbiosis mutualisme untuk interest tertentu demi mendapatkan bagian dari kekuasaan atau minimal mendapatkan bantuan dari elit politik yang didukung. Sementara elit politik akan mendapatkan legitimasi moral keagamaan dari Ustadz.

Namun bagaimanapun juga, para Ustadz telah melestarikan dirinya bukan saja sebagai pemimpin non formal, tetapi sebagai institusi yang kritis terhadap kekuasaan yang ada, dan fungsi kritis tersebut akan tetap bertahan jika Ustadz tidak masuk dalam ranah kekuasaan formal birokrasi. Agama dan Ustadz menjadi institusi sosial yang mampu mengikat dalam sistem simbol kebersamaan dan membantu menumbuhkan kembangkan rasa solidaritas, sehingga agama menjadi landasan dalam melakukan gerakan-gerakan sosial. Kepercayaan terhadap Ustadz dibandingkan pada pemimpin lainnya menurut Bouwsma (1998) dipandang bahwa orientasi penduduk pedesaan adalah Ustadz, bukan pada kepemimpinan birokrasi. Hal itu karena Ustadz memiliki kharisma tersendiri yang hampir tidak dimiliki oleh kepemimpinan yang lainnya (Taufik Abdullah, 1979).

Menganalisis tesis Weber, bahwa Islam memiliki keistimewaan keabsahan dari kebenaran dogma yang ditentukan oleh konsensus para Ustadz sebagai tokoh agama. Maka Islam merupakan agama yang oleh kelompok status tertentu, seperti dalam perang agama, di mana bagi

sebagian para prajurit adalah untuk mendapatkan ghanimah. Karena itulah kelas sosial dalam Islam berorientasi pada kepentingan feodal, artinya ada jaringan sosial antara patron dan klien, maka muncullah prestise sosial.

Jadi, Weber beranggapan bahwa struktur patrimonial yang berlandaskan kharisma penguasa adalah faktor utama dari sistem budaya agama Islam, sehingga diperlukan penguasa kharismatik dan keramat untuk menjadi pemimpin atau penguasa. Sedangkan penguasa yang bercorak tersebut harus pintar menjaga kehormatan dan kepercayaan umatnya.

Ketika seorang Ustadz terlibat dalam politik kekuasaan, maka akhirnya muncul juga sebutan kiai politik. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat punya penilaian tersendiri tentang sosok Ustadz dengan segala perannya, atau juga untuk membedakan antara Ustadz yang terlibat politik dengan yang tidak terlibat. Disadari atau tidak, bahwa keterlibatan Ustadz dalam dunia politik menyebabkan semakin mudarnya kharisma seorang kiai di mata umatnya. Ekses negatif ini tentunya dirasakan oleh kiai yang terlibat dalam perpolitikan, akan tetapi hampir seluruh kiai menerima imbasnya. Para kiai yang tidak berpolitik pun merasakan lunturnya loyalitas yang dahulu sudah terpatri dan tertanam sangat kuat. Namun ada anggapan dari Sebagian masyarakat yang menilai

positif keterlibatan Ustadz dalam dunia politik, mereka berasumsi bahwa masuknya Ustadz dalam percaturan politik diharapkan dapat menekan berbagai penyelewengan kekuasaan dan lebih mempermudah menjembatani persoalan-persoalan umat. Sebaliknya, peran ganda Ustadz dalam dunia politik dinilai telah menyalahi koridor dan filosofi masyarakat.

Bagi sebagian Ustadz yang masuk dalam ranah politik, bahwa keterlibatannya bukan tanpa alasan, karena faktor historis cukup kuat untuk seorang Ustadz untuk harus terlibat dalam politik, bagi mereka Nabi Muhammad SAW adalah sosok negarawan sebagai kepala Negara, dimana dalam tugas sucinya adalah sebagai pembawa risalah. Demikian juga Keterlibatan Ustadz dalam pentas politik di Indonesia sejak, dimana sejak zaman Kesultanan Mataram dan pada masa penjajahan Belanda, Ustadz mempunyai peranan penting dalam perjuangan Hizbullah dan Sabilillah Dimana pesantren menjadi tempat pelatihan para pejuang.

Demikian juga dalam perjuangan kemerdekaan, para Ustadz banyak terlibat memperjuangkan meraih kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut berarti, secara ideologis ajaran Islam melingkupi tidak hanya pada aspek ritual dan moral saja, tetapi juga pada nilai-nilai semua sisi kehidupan—baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, maupun persoalan politik.

Semestinya Ustadz sah-sah saja berpolitik, namun tidak diorientasikan pada kekuasaan, melainkan menanamkan nilai nilai moral untuk pencerdasan dan penguatan umat dan masyarakat. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. Foucault tidak menolak cara pandang semacam ini, tapi hal itu tidak cukup untuk memahami praktik penundukan yang tak kasat mata. Pandangan yang lebih kritis tentang kekuasaan muncul dalam kajian budaya. Konsep Gramsci tentang hegemoni sering digunakan untuk membongkar kemapanan budaya dalam proses dominasi yang terselubung. Dalam penjelasan yang lebih canggih, kekuasaan bekerja melampaui cara-cara hegemonik, yang mana hal ini dikonsepsikan Foucault sebagai *governmentality*.

Ustadz mengemban amanah kekuatan kultural yang selalu mengingatkan para pemimpin, sekaligus menegaskan perannya untuk secara etis-profetik mengawal kepentingan umat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, maka peran Ustadz akan tetap membumi di masyarakat. Pada akhirnya, moralitas Ustadz tidak menjadi sekedar bahasa isoterik belaka, tetapi dapat menjadi bahasa dan perjuangan politik demi mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian bagi umat. Walaupun pada akhirnya pembangunan,

industrialisasi dan modernisasi dijadikan alasan keterlibatan berbagai elemen termasuk di dalamnya peran Ustadz, namun menjaga tradisi dan nilai-nilai hidup harus tetap menjadi program yang beriringan, agar tidak mengakibatkan eksese negatif yang harus diterima masyarakat. Sebagaimana digaungkan Sunyoto Usman, bahwa semestinya gerakan keagamaan berorientasi pada pemeliharaan tradisi local dengan berpegang pada proses internalisasi ajaran agama dengan tidak harus menghancurkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam kultur lokal, agar tidak terjadi kebangkitan resistensi pada ajaran agama yang diintroduksi (Sunyoto Usman, 2015).

Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang di mana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. (Arkoun, 1994).

Memberikan perbedaan yang jelas antara wewenang dan kekuasaan dalam Islam. Wewenang muncul dalam hubungan pribadi tanpa ada kendala fisik atau hukum. Wewenang merupakan keterikatan sementara seorang individu atau kelompok pada kata-kata dan

tingkah laku seorang individu lain yang membawahkan dirinya sendiri terhadap tujuan-tujuan mereka yang mengikutinya. Seperti, kehadiran Nabi Muhammad sebagai yang berwenang dalam agama, maka beliau menjadi pemimpin ummatnya. Sedangkan kekuasaan berada diluar yang dikuasai, bergantung pada tempatnya bertopang, apakah pada wewenang atau pada kendala. Kekuasaan menimbulkan persatuan dan ketaklukan bagi mereka yang ditundukkan. Maka Ustadz sebagai tokoh agama ditempatkan sebagai orang yang mempunyai kekuasaan, dimana mereka memiliki kekuasaan untuk menilai, memutuskan sejauh batas melakukannya atas nama tatanan. Hal ini merupakan gabungan dari paksaan, pengaturan alam semesta wewenang dan daya.

Bagaimanapun juga, peran sosial politik Ustadz dalam sosial politik yang tumbuh dan berkembang khususnya pada masyarakat industrialisasi saat ini, akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan politik. Selain itu, kenyataan empirik juga mengilustrasikan perpaduan antara agama dan politik ini seperti terlihat pada peran-peran yang dimainkan sejumlah Ustadz dalam panggung politik praktis paling tidak selama beberapa dekade terakhir. Di antara efek sosial dari peran ganda yang ditimbulkannya adalah adanya pergeseran kecenderungan masyarakat dari tradisional ke modern.

Namun selama masih dalam kendali koridor keagamaan, dan juga selama Ustadz masih dapat menjaga ketokohnya, maka masyarakat juga masih kuat beranggapan bahwa secara normatif, Ustadz tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan. Ustadz masih ditempatkan sebagai sumber fatwa dan sumber inspirasi kebajikan. Ketika masyarakat berada di simpang jalan di antara pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Sementara di sisi lain, fenomena perubahan-perubahan struktur kognisi Ustadz berkenaan dengan peran-peran sosial politik tersebut berkaitan erat dengan persepsi teologis yang dianutnya.

Jadi, untuk menempatkan seputar dilema tarik-menarik antara peran ganda Ustadz dalam rentang kehidupan sosialpolitik dan agama, maka juga yang menjadi pertimbangan adalah sejarah kerangka teologis yang berakibat pada aksi sosial politik yang dihasilkannya. Maka jika ditelusuri lebih detail akan menghasilkan pemahaman, *pertama*: bahwa ada kecenderungan Ustadz akan terlibat dalam urusan politik untuk menempatkan urusan umat dalam panggung politik praktis dengan asumsi, politik sebagai kendaraan paling praktis. Dalam hal ini biasanya Ustadz memahami betul konsekuensi yang ia terima, yakni berkurangnya peran sosial keagamaannya, sehingga ia mengantisipasi dengan menempatkan sanak

keluarganya untuk menangani peran tersebut, sehingga Ustadz bisa lebih fokus pada urusan politik, *kedua*: Ustadz yang memandang ringan dan lebih fleksibel pada urusan politik praktis, baginya politik hanyalah menjadi kepentingan sesaat dan menjadi batu loncatan dalam kepentingan pragmatis semata, *ketiga*: Ustadz yang konsisten untuk tidak bersinggungan dengan urusan politik.

Adanya pemahaman yang melatarbelakangi klasifikasi peran Ustadz kemudian melahirkan konsekuensi logis terhadap persepsi masyarakat tentang sosok Ustadz. Menjamurnya partai-partai politik yang bernuansa agama juga tidak lepas dari asumsi masyarakatan tentang keseriusan Ustadz untuk lebih jauh terlibat dalam dunia politik. Maka tidak salah jika kemudian ada penggambaran masyarakat tentang sosok “Ustadz partai”.

Oleh karena itu, kajian tentang peran sosial dan politik Ustadz dalam perspektif historis-teologis menarik untuk dikaji lebih mendalam, mengingat urgensi kedalaman tersebut akan menghasilkan pemetaan Ustadz yang lebih komprehensif. Kajian historis-teologis merupakan unsur yang sangat penting untuk mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan adanya perubahan kerangka persepsi yang menjadi dasar pembentukan struktur kognisi yang dimilikinya.

Maka sudah semestinya sosok Ustadz muncul dari sebuah pengembangan kepribadian yang terbuka dan memiliki komitmen yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai elemen seorang tokoh agama, sehingga mampu melampaui batas-batas primordialisme namun tetap berdiri di atas kapasitas intelektualnya. Ada juga perubahan tertentu yang kadang salah dan dikaitkan dengan modernisasi. Hal tersebut disebabkan tidak semua modernisasi menjadi seperti semodern barat, itu karena pola modernisasi berbeda-beda. Tradisi dapat berubah tanpa modernisasi, demikian juga modernisasi dapat terjadi tanpa perubahan mendasar dalam tradisi. Unsur-unsur tradisi yang tertanam dalam ketokohan Ustadz dan kantong-kantong kebudayaan dapat dipertahankan dalam masyarakat modernisasi, karena unsure-unsur tradisional tersebut dapat menyediakan landasan yang kuat dalam memetakan modernisasi.

D. Pro Dan Kontra Respon Masyarakat Terhadap Politik Ustadz

Setelah menjalani jalan yang panjang agar masyarakat Indonesia mengerti keadaan Ustadz terlibat dalam politik dan memakluminya walaupun ada juga sebagian masyarakat yang kecewa terhadap terhadap Ustadz yang terlibat politik dan sebagian besar masyarakat

mendukung langkah-langkah yang di jalankan oleh para Ustadz.

Masyarakat Indonesia yang pada umumnya beragama islam dan sangat menjaga keutuhan islam sebagai agama yang baik, sangat menghargai terhadap keputusan yang di ambil oleh Ustadz sebagai pemersatu masyarakat agar lebih baik kedepannya dan masyarakat ingin pemerintah yang islami yang mengerti terhadap keinginan masyarakatnya.

Setelah terlibatnya Ustadz dalam politik maka situasi di dalam masyarakat semakin memanas. Masyarakat saling unjuk gigi untuk menyuarakan pendapatnya mengenai masalah keterlibatan Ustadz ke dalam dunia politik. Hal ini semakin membuat suasana politik di Indonesia semakin memanas apalagi Ustadz-Ustadz ikut serta terlibat didalam politik dan berbagai banggapanpun mulai bermunculan di ranah masyarakat.

Berbagai pro dan kontra dari masyarakat mulai bermunculan. Hari demi hari respon masyarakat terhadap Ustadz semakin menyebar luas terutama di kalangan Masyarakat Indonesia yang ikut campur terhadap keterlibatan Ustadz di dalam kancah politik, apakah Ustadz-Ustadz terlibat di dalam politik itu di larang. Dan pertanyaan-pertanyaan ini terus bermunculan di mulut masyarakat.

Apabila dilihat secara seksama maka banyak yang mendukung keterlibatan Ustadz di dalam dunia politik, karena keterlibatan Ustadz dianggap sangat mencerminkan keinginan seluruh masyarakat dengan menginginkan pemimpin jujur dan amanah.

Kontra timbul sebagian dari kalangan masyarakat awam yang tidak setuju dengan keterlibatan Ustadz di dalam kancah politik, keterlibatan Ustadz hanya dapat mencitrakan nama baik beliau karena politik itu tidak baik bahkan dapat menghancurkan diri sendiri maupun masyarakatnya. Dan ini memunculkan anggapan bahwa keterlibatan Ustadz sebenarnya sangat baik bagi masyarakat agar kedepannya terbentuk pemimpin-pemimpin yang jujur yang mau peduli terhadap masyarakatnya.

E. Kontroversi dan Tantangan Ustadz dalam Peran Politik

Sebuah paradigma lama dan menjadi tata nilai dalam masyarakat adalah buruknya “nilai politik”. Jika politik itu dikaitkan dengan politikus atau para pegiat sosial kemasyarakatan, maka itu sangat wajar dan sah-sah saja. Namun, jika dikaitkan dengan Ustadz, ustadz, pendeta, dan ahli agama, maka seakan politik berubah menjadi haram dan akibatnya mereka tidak wajar

bersentuhan dengan politik karena dianggap kotor dan penuh dusta.

Ustadz yang mencoba masuk ke ranah politik praktis akan mendapat catatan buruk dari masyarakat. Nilainya sebagai seorang ahli agama akan tercoreng. Tidak jarang Ustadz yang masuk ke ranah itu, mendapat cacian dan bahkan ditinggalkan oleh umatnya.

Benarkah politik itu buruk? Islam sangat mementingkan politik. Setidaknya ada dua alasan yaitu *hirashah al diin* (menjaga agama), dan *siyasa al dunya* (mengatur bumi). Dalam sejarah tercatat bahwa Rasulullah, selain sebagai pemimpin Agama, negara, juga sebagai ahli dalam berpolitik. Piagam Madinah adalah contoh politik Rasulullah yang amat hebat.

Rasulullah yang berfungsi sebagai Nabi dan tokoh politik, sukses besar dalam menjalankan pemerintahan Islam. Dua suku, Aus dan Khazraj yang sudah berabad-abad bermusuhan berhasil dipersaudarakan, Kristen, Yahudi, Nasrani, dan bahkan kaum Pagan bisa hidup berdampingan damai dan tentram di kolong bumi Madinah. Hal ini bisa terjadi karena kepiawaian seorang politikus Islam yang berintegritas tinggi; santun, jujur, amanah, dan disiplin. Demikian halnya kepemimpinan sahabat dengan model khilafah.

Tidak boleh memisahkan dua kepentingan besar dalam Islam yaitu kepentingan menjaga agama dan

kepentingan mengatur bumi. Sebagaimana tidak boleh memisahkan Ustadz dengan perannya sebagai pewaris nabi yang wajib mengurus bumi Allah.

Masyarakat sebaiknya pandai dan mengetahui sejarah, bahwa Ustadz adalah Pewaris Nabi. Mereka mempunyai tugas yang mulia, yaitu menjaga agama dan memperjuangkan kebutuhan dan keadilan masyarakat, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para khalifah dan Ustadz salaf.

Jika paradigma masyarakat seperti diatas tetap dipelihara, maka bukan tidak mungkin agama Islam akan rusak, mundur dan stagnan karena urusan itu direkomendasikan kepada para politikus murni yang kurang paham akan nilai-nilai ajaran Islam. Masyarakat akan semakin tidak berdaya. Integritas yang mereka miliki tidak teruji karena kedangkalan pengetahuan agama mereka.

Ibnu Aqil Al Hanbali mengatakan bahwa politik adalah *maa kaana fi'lan yakunu ma'ahu al naasu aqraba ila al shalaah wa ab'ada an al fasaad, wa in lam yadha'hu al nabiyyi wa laa nazala bihi wahyun*. Politik adalah suatu upaya strategis untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, menjauhkan mereka dari kerusakan. Meski belum pernah diletakkan oleh Nabi dan tidak ada landasan wahyunya.

Islam menilai politik sebagai sebuah upaya dalam rangka menjaga agama dan kehidupan dunia. Kendati tidak ada aturan pasti dari nabi, namun dalam prakteknya membuahkan berbagai action cerdas dan menyejukkan. Nabi menyerahkan urusan kemaslahatan kepada umat-Nya *antum a'lamu bi umuuri dunyakum*, kamu lebih tahu akan urusan dunia-mu.

Beberapa bentuk pemerintahan yang pernah ada di belahan dunia adalah; teokrasi yaitu kepemimpinan yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Monarki, kepemimpinan berdasarkan keturunan atau kerajaan. Autokrasi, kepemimpinan kebal hukum. Demokrasi, kedaulatan ditangan rakyat, dan khilafah yaitu dipimpin oleh seorang amirul mukminin untuk semua umat di seluruh dunia. Khilafah diyakini sebagai salah satu model pemerintahan yang paling bagus yang pernah ada. Namun, tidak bisa dipaksakan keberlakuannya karena setiap negara memiliki caranya sendiri.

Indonesai memiliki ijtihad dalam memerankan “politiknya”. Pancasila dan Undang-undang dasar adalah sebuah wadah pemersatu bangsa. Seluruh aturan yang ada berdasarkan nalar yang baik dan tidak bertentangan dengan nilai Islam, tentu juga nilai dalam agama lain. Negara dengan jumlah penduduk, suku, bangsa, dan bahasa terbanyak di dunia, mampu membawa masyarakat yang damai, toleran, dan aman.

Sebaiknya, masyarakat yakin bahwa dengan memberikan mandat kepada Ustadz dalam memainkan politiknya, negara akan aman, masyarakat akan makmur, damai dan sejahtera. Sebaliknya jika mandat itu dibebankan kepada orang yang tidak paham agama, maka praktek kolusi, nepotisme, dan korupsi semakin menjamur.

Semakin banyak tokoh agama yang mengambil peran dalam menjalankan politik, baik di legislatif, yudikatif, dan eksekutif, maka akan membawa dampak yang lebih positif. Para pemuka agama baik Islam, Kristen, Katolik, Budha dan lainnya, jika sudah bersatu dalam meramaikan politik aktif akan membawa kemaslahatan yang lebih besar.

Peran politik seorang ustadz atau pemimpin agama seringkali menjadi bahan kontroversi dan tantangan. Dalam konteks politik, mereka dihadapkan pada berbagai masalah yang tidak selalu mudah dihadapi. Berikut adalah beberapa potensi kontroversi dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh ustadz atau pemimpin agama dalam berperan dalam politik, beserta beberapa referensi yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut.

Kontroversi terkait Keterlibatan dalam Politik: Salah satu potensi kontroversi yang sering dihadapi oleh pemimpin agama yang terlibat secara aktif dalam politik adalah kritik terkait campur tangan agama dalam urusan

politik. Hal ini seringkali memicu perdebatan mengenai pemisahan antara agama dan negara. Beberapa kalangan menganggap bahwa agama seharusnya tidak terlibat dalam urusan politik, sementara yang lain berpendapat bahwa agama memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan politik yang lebih baik. Muhtadi (2018) menekankan bahwa perdebatan mengenai keterlibatan agama dalam politik bukanlah hal yang baru, namun masih menjadi masalah yang kompleks dan perlu terus dibahas.

Tantangan dalam Menyelaraskan Nilai-Nilai Agama dengan Politik Praktis: Menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan politik praktis adalah tantangan yang dihadapi oleh pemimpin agama yang terlibat dalam politik. Mereka seringkali dihadapkan pada dilema antara prinsip agama yang harus dijunjung tinggi dan realitas politik yang kompleks. Hefner (2011) menekankan bahwa pemimpin agama harus mampu menyelaraskan antara prinsip agama dan kebutuhan politik yang berkembang, tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang dipegang teguh.

Respon dari Pihak yang Berseberangan: Pemimpin agama yang terlibat dalam politik juga dapat menghadapi resistensi atau kritik dari kelompok atau individu yang memiliki pandangan politik yang berbeda atau yang menganggap keterlibatan agama sebagai ancaman. Fealy (2009) menekankan bahwa pemimpin agama harus siap

menghadapi berbagai respon yang mungkin datang dari pihak yang berseberangan dengan pandangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin agama harus memiliki keterampilan komunikasi dan diplomasi yang baik untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemimpin agama dalam membangun kesepakatan bersama adalah kontroversi terkait pemilihan kandidat atau partai. Dalam prakteknya, pemimpin agama seringkali mendukung atau menentang kandidat atau partai tertentu, yang dapat menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Dukungan yang diberikan oleh pemimpin agama seringkali dianggap sebagai intervensi agama dalam proses politik, yang dapat memunculkan konflik di antara masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda.

Selain itu, pemimpin agama juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga netralitas agama ketika terlibat dalam politik yang penuh dengan perbedaan dan konflik. Sebagai pemimpin agama, mereka seringkali diharapkan untuk tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Namun, ketika terlibat dalam politik yang penuh dengan perbedaan dan konflik, menjaga netralitas agama bukanlah hal yang mudah dilakukan.

Dengan begitu banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pemimpin agama dalam membangun kesepakatan

bersama di tengah keragaman masyarakat, dibutuhkan keberanian dan kesabaran dari mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, pemimpin agama juga perlu memiliki pemahaman yang luas tentang politik dan masyarakat agar dapat memahami berbagai perspektif yang ada. Dengan demikian, pemimpin agama dapat berperan sebagai mediator yang dapat mempertemukan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Dalam rangka membangun kesepakatan bersama yang kokoh dan berkelanjutan, pemimpin agama juga perlu membangun dialog dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, pemimpin agama dapat memahami perbedaan dan mencoba mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dapat disimpulkan bahwa pemimpin agama yang terlibat dalam politik dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membangun kesepakatan bersama di tengah keragaman masyarakat. Namun, dengan keberanian, kesabaran, dan pemahaman yang luas, pemimpin agama dapat memainkan peran yang penting dalam menciptakan kesepakatan politik yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat secara merata.

F. Respon Masyarakat Terhadap Pesan Politik Ustadz

Pesan politik yang disampaikan oleh seorang ustadz dapat memiliki dampak yang beragam terhadap respon masyarakat. Hal ini sangat tergantung pada konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang ada. Terkadang, pesan politik yang disampaikan dapat diterima secara positif oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap moralitas mereka. Namun, terkadang pesan politik tersebut juga dapat menimbulkan kontroversi dan perpecahan di kalangan masyarakat.

Sebagai seorang pemimpin agama, ustadz memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Mereka cenderung menghargai pandangan dan arahan politik yang diusung oleh ustadz. Dalam bahasa santri, hal ini sering disebut sebagai "*Manut Pak Kiyai*". Hal ini menunjukkan bahwa posisi dan otoritas ustadz dalam masyarakat sangat dihormati dan dianggap sebagai sumber kebenaran.

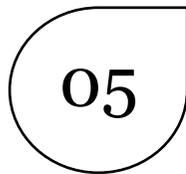
Selain itu, pesan politik yang disampaikan oleh ustadz juga dapat membentuk opini dan pandangan politik masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik tertentu dapat dipengaruhi oleh penafsiran agama yang diberikan oleh ustadz. Hal ini dapat tercermin dalam sikap politik yang mereka ambil. Maka dari itu, peran

ustadz dalam menyampaikan pesan politik sangatlah penting karena dapat membentuk pandangan dan opini masyarakat terhadap isu-isu politik yang berkembang.

Tidak hanya itu, kemampuan ustadz dalam berkomunikasi secara efektif juga dapat memobilisasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam segala aktivitas politik yang ada. Dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh masyarakat, ustadz dapat menarik dan memotivasi mereka untuk turut serta dalam segala kegiatan politik yang diusungnya. Ini merupakan bukti bahwa peran ustadz tidak hanya terbatas sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat mempengaruhi kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam kesimpulannya, pesan politik yang disampaikan oleh ustadz dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap respon masyarakat. Pesan tersebut dapat membentuk opini dan pandangan politik masyarakat, serta memobilisasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Oleh karena itu, para ustadz perlu memahami tanggung jawab dan pengaruh besar yang dimiliki dalam menyampaikan pesan politik. Pesan yang disampaikan haruslah sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral agama, serta dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun negara yang lebih baik.

Bagian 5



05

Studi Kasus Atau Contoh Nyata

A. Ustadz dan Pengaruhnya dalam Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih pemimpin dan wakilnya yang akan bertanggung jawab dalam mengemban kebijakan negara. Namun, seringkali terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemilihan masyarakat, salah satunya adalah pengaruh dari tokoh agama yang dikenal sebagai ustadz.

Ustadz atau para pemuka agama memiliki peran yang sangat besar dalam masyarakat, terutama dalam menentukan pilihan politik. Dengan memiliki pengaruh yang luas dan dihormati oleh banyak orang, ustadz dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu dalam pemilihan umum. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi proses pemilihan umum.

Salah satu contoh nyata yang dapat dijadikan studi kasus adalah pemilihan umum presiden tahun 2014 dan 2019 di Indonesia. Pada saat itu, terdapat seorang ustadz yang aktif memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden. Ustadz tersebut secara terbuka mendukung serta mengajak masyarakat untuk memilih calon yang dianggapnya sebagai pilihan yang paling baik untuk memimpin negara.

Pengaruh dari ustadz tersebut sangat besar, terutama di kalangan masyarakat yang konservatif dan taat agama. Dengan kata-kata yang cerdas dan penuh pengaruh, ustadz tersebut berhasil mempengaruhi pemilih untuk memilih calon yang didukungnya. Namun, di sisi lain, pengaruh tersebut juga menimbulkan kontroversi dan memicu perpecahan di antara masyarakat yang memiliki pandangan politik yang berbeda.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ustadz dalam pemilihan umum dapat memengaruhi pola pikir dan pilihan politik masyarakat secara signifikan. Namun, perlu diingat bahwa sebagai pemimpin agama, ustadz juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memanipulasi pemilih dengan memanfaatkan kekuasaan dan pengaruhnya.

Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cerdas dan berpikiran terbuka, kita harus mampu memilah informasi dan tidak terpengaruh secara langsung oleh pengaruh

ustadz atau tokoh agama lainnya. Kita harus memilih berdasarkan pemikiran dan penilaian yang objektif terhadap kualifikasi dan program kerja calon pemimpin yang akan dipilih.

Dalam konteks demokrasi, pemilihan umum memang merupakan hak setiap warga negara. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa hak tersebut harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Mari bersama-sama membangun kesadaran politik yang sehat dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, termasuk pengaruh dari ustadz atau tokoh agama lainnya. Karena, pada akhirnya, itu adalah hak kita sebagai pemilih untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara kita.

B. Peran Ustadz sebagai Mediator dalam Konflik Sosial Politik

Konflik sosial politik seringkali terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Konflik tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan ideologi, agama, ras, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi konflik tersebut, dibutuhkan peran mediator yang dapat membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Salah satu contoh nyata dari peran mediator dalam konflik sosial politik di Indonesia adalah melalui keterlibatan seorang ustadz.

Seperti yang terjadi pada tahun 2019 lalu, ketika Indonesia dilanda oleh konflik sosial politik yang cukup besar akibat hasil dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Konflik tersebut memuncak ketika salah satu pihak menolak hasil pemilu dan melakukan unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan dan kekacauan di beberapa daerah.

Namun, di tengah kekacauan tersebut, seorang ustadz yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam berdialog dan mempersatukan umat, datang sebagai mediator. Ustadz tersebut adalah Ustadz Adi Hidayat, yang dikenal luas sebagai salah satu tokoh agama yang memiliki banyak pengikut di Indonesia.

Mengambil peranan sebagai mediator, Ustadz Adi Hidayat melakukan upaya-upaya persuasif untuk mengajak kedua belah pihak untuk duduk bersama dan membahas cara mengatasi konflik yang terjadi. Dengan kepiawaiannya dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan secara bijak dan santun, Ustadz Adi Hidayat mampu menyatukan kedua belah pihak yang selama ini saling berseberangan.

Ustadz Adi Hidayat juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pesan perdamaian dan kebersamaan. Melalui akun media sosialnya yang memiliki puluhan juta pengikut, ia menyampaikan pesan-pesan

yang mampu menenangkan kedua belah pihak dan mengajak untuk saling menghormati perbedaan.

Dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah, akhirnya kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan damai dan memilih jalan tengah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari peran mediator yang dimainkan oleh Ustadz Adi Hidayat, yang berhasil membawa kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan bekerja sama membangun kebersamaan.

Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran seorang ustadz sebagai mediator dalam konflik sosial politik di Indonesia. Melalui kepiawaian dan kebijaksanaannya, Ustadz Adi Hidayat telah membuktikan bahwa agama dapat menjadi sarana untuk mempersatukan umat dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah konflik yang terjadi. Semoga contoh ini dapat dijadikan teladan bagi kita semua untuk selalu mengutamakan perdamaian dan kerukunan dalam bermasyarakat.

C. Keberhasilan dan Kegagalan Ustadz dalam Membawa Perubahan

Ketika mendengar kata "ustadz", pasti kita langsung teringat pada sosok yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan menjadi panutan bagi umat Islam. Namun, selain sebagai pemimpin spiritual, seorang ustadz

juga memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dengan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat, seorang ustadz memiliki potensi besar untuk membawa perubahan baik dalam kehidupan umat maupun masyarakat secara keseluruhan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga kasus di mana seorang ustadz mengalami kegagalan dalam membawa perubahan. Mari kita lihat contoh nyata dari kedua sisi ini.

Salah satu contoh nyata keberhasilan seorang ustadz dalam membawa perubahan dapat dilihat pada kisah hidup ustadz Abdul Somad. Dengan gaya dakwah yang cerdas, ustadz Abdul Somad mampu menginspirasi banyak orang untuk meningkatkan iman dan ketaqwaan mereka. Melalui pesan-pesan yang disampaikannya, banyak umat Islam yang berubah menjadi lebih baik dan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan mereka. Selain itu, ustadz Abdul Somad juga aktif dalam menggalang dana untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan, dari mulai pembangunan masjid hingga memberikan bantuan kepada korban bencana. Hal ini membuktikan bahwa seorang ustadz tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai sosok yang peduli dan berperan dalam memajukan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat juga contoh kegagalan seorang ustadz dalam membawa perubahan, seperti yang terjadi pada kasus ustadz Babeh Haikal. Meskipun memiliki

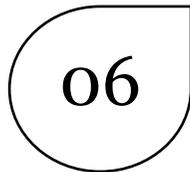
pengetahuan agama yang luas, namun ustadz Babeh Haikal sering terlibat dalam kontroversi akibat pernyataan-pernyataannya yang dianggap merendahkan dan memicu perpecahan di masyarakat. Bahkan, seringkali pesan-pesan yang disampaikannya justru menimbulkan kemarahan dan kebencian dari sebagian umat. Hal ini menunjukkan bahwa seorang ustadz harus berhati-hati dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, karena setiap perkataannya memiliki dampak yang besar pada masyarakat.

D. Menjadi Ustadz yang Sukses dalam Membawa Perubahan

Dari kedua contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang ustadz harus mampu menjadi sosok yang bijaksana serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama dan keadaan masyarakat. Selain itu, seorang ustadz juga harus memiliki kemampuan untuk mengakomodasi berbagai pemikiran dan kebutuhan masyarakat, serta mampu menyesuaikan cara penyampaian pesan-pesannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian, seorang ustadz dapat berhasil membawa perubahan yang positif dalam kehidupan umat dan masyarakat, serta menjadi panutan yang baik bagi generasi muda.

Dalam akhir tulisan ini, mari kita semua mengambil hikmah dari studi kasus ini, bahwa menjadi seorang ustadz

adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Semoga kita dapat terus belajar dari para ustadz yang telah sukses membawa perubahan, serta menghindari kesalahan yang pernah dilakukan oleh ustadz yang mengalami kegagalan. Mari bersama-sama menjadikan agama sebagai sumber kebaikan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat.



Bagian 6

Implikasi dan Relevansi

A. Implikasi Komunikasi Politik Ustadz Terhadap Masyarakat

Di kalangan masyarakat daerah Kota Bandung Ustadz Syehabuddin sudah banyak dikenal sebagai aktivis dakwah, bahkan beliau sudah mengepakkan sayapnya dalam dunia dakwah ke tingkat provinsi. Dalam kegiatan-kegiatan dakwahnya tentu saja ilmu yang diberikan serta kajian yang dibahas dibuat semenarik mungkin dan disesuaikan dengan objek dakwahnya. Salah satu kajian dakwah yang dibahas secara umum tapi dapat menyentuh ke hati masyarakat sebagai objek dakwahnya adalah kajian politik.

Haidir (2013) menjelaskan bahwa dalam keterlibatan ulama dalam melaksanakan komunikasi dengan pemerintah perlu berada posisi yang berimbang, netral, dan istiqamah. Ulama adalah panutan masyarakat,

tidak hanya dalam aspek pemahaman agama saja, akan tetapi juga dari aspek kehidupan keseharian, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara ulama dalam memainkan perannya dalam pembangunan tidak harus selalu dalam bidang kerohanian saja. Akan tetapi sudah perlu dipertimbangan dengan matang agar ulama juga berperan dalam pembangunan fisik atau material. Dalam hal ini tidak dimaksudkan bahwa ulama akan turut serta mengangkat cangkul atau linggis dan semacamnya untuk dikatakan terlibat dalam pembangunan fisik. Walaupun dalam dari aspek kemasyarakatan misalnya, dalam acara kerja bakti atau gotong royong bersama masyarakat hal itu bukanlah sesuatu yang tabu. Justru perilaku seperti ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih bersemangat lagi.

Para Ulama merupakan sosok panutan, figur moral, dan orang yang memiliki wawasan keagamaan yang luas. Dengan demikian diharapkan dapat membimbing umat dan menjadi benteng moral dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan hadirnya sosok ustadz dalam panggung politik, diharapkan dunia politik menjadi lebih bermoral, mementingkan kepentingan rakyat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Seperti dikatakan Al-Faruqi (2000) bahwa “diri Ulama adalah simbol dari pada etika dan moralitas politik, keterlibatan Ulama dalam kancah politik harus bisa

memberikan sumbangan besar bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral. Moral yang betul-betul hidup dan menjadikan landasan politik dan bukan sekadar slogan politik”.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Ustadz Syehabuddin merupakan salah satu ulama yang memiliki pandangan politik yang luas, sehingga beliau memiliki peran yang penting dalam menanamkan keteguhan hati masyarakat dalam menghadapi sejumlah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ranah politik. Kredibilitas seorang ustadz dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya ketika pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat itu dikemas sedemikian rupa supaya lebih baik cantik, lalu disampaikan kepada masyarakat dengan daya persuasi, maka khalayak akan tertarik untuk mengikuti makna pesan-pesan itu.

Mengingat bahwa satu aspek penting dalam demokrasi adalah menciptakan warga yang menguasai informasi, berpengetahuan dan terlibat dalam proses demokrasi. Partisipasi rakyat adalah dasar dari suatu masyarakat demokratis. Melalui partisipasi ini menyediakan sarana bagi rakyat untuk mendengar suara mereka dan untuk memberdayakan mereka yang tak berdaya dalam masyarakat (Eveland, 1993). Sebagai pihak

yang mengemukakan pembangunan dan mempunyai tanggung jawab memajukan rakyat, maka adalah penting partisipasi semua pihak dilaksanakan secara bersama-sama. Keperluan pada kemajuan memerlukan proses pembinaan untuk menukar keadaan yang serba kekurangan kepada keadaan kesejahteraan hidup yang lebih sempurna (Abdullah, 2011). Dengan demikian, implikasi yang terjadi di masyarakat menjadi tolak ukur sejauh mana kemahiran masyarakat dalam memandangi dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dalam hal ini ustadz menjadi pemeran utama yang memegang kendali arah kacamata politik yang akan dianut oleh masyarakat.

Salah satu kajian Ustadz Syehabuddin mengenai politik yang secara mendasar disampaikan kepada masyarakat adalah tentang dunia politik yang tidak tetap dalam artian siapapun orang nya akan dapat berubah kapan saja jika ada dalam nuansa politik, maka sebagai umat islam yang memiliki keimanan tentu diarahkan agar tetap berdoa memiliki keteguhan hati sehingga apapun yang dapat merubah kita tidak ada dalam jalan-Nya segera dijauhkan. Salah satu contoh kecil yang senantiasa terjadi di lingkungan masyarakat dalam nuansa politik adalah konflik perbedaan pilihan calon pemimpin yang mengakibatkan munculnya permusuhan dan saling tidak menghargai satu sama lain, padahal agama islam adalah agama yang menjunjung tinggi sikap toleransi.

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya tentang hubungan antar manusia yang dapat menciptakan kerukunan di antara mereka. Islam mengakui adanya titik temu yang bersifat esensial dari berbagai agama, khususnya agama-agama Samawi yakni kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan untuk hidup Bersama. Adanya toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting, sebab keberadaan toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan, tanpa adanya toleransi tidak mungkin ada sikap saling menghormati, mengasihi dan gotong-royong antar umat beragama (Ahmad, 1993).

Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya jangankan perbedaan pilihan calon pemimpin, perbedaan-perbedaan yang sifatnya lebih penting termasuk perbedaan agama sekalipun didalamnya harus didasarkan sifat toleransi, sebagaimana penjelasan firman Allah dalam QS. Al Kaafiruun mengenai toleransi bergama.

Selanjutnya Ustadz Syehabuddin juga mengkaji bagaimana, dan seperti apa dalam memilih pemimpin, karena sebagai umat islam tentu saja kita akan aman tentram dan sejahtera jika pemimpin sebagai pemegang kekuasaannya faham agama dan menjalani kehidupan

sehari-harinya sesuai dengan syariat agama. Meski demikian, pada dasarnya pemahaman masyarakat umum terhadap politik sangatlah beragam, tentu saja mereka berlaku sesuai dengan ormas-ormas mereka. Sebagai contoh ada salah satu ormas yang memang anti terhadap pemilu bahkan ada juga yang menganggap para pemerintah adalah *thogut* dengan demikian kajian yang Ustadz Syehabuddin sampaikan adalah himbauan kepada masyarakat secara umum agar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, termasuk didalamnya berhati-hati dalam menentukan pilihan.

Dalam kondisi pemerintahan dan negara demokrasi, seseorang harus memperhatikan dan memahami arti dan konskuensi hukum Islam. Pada satu sisi ada pendapat ulama menyatakan hukumnya haram dan tidak ada ketentuan tentang sistem pemilihan umum. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Hukum Islam mengajarkan untuk memahami dan mengetahui syarat-syarat seorang yang layak dijadikan pemimpin karena pemimpin merupakan penentu nasib dan arah kebijakan sebuah negara yang dikuasainya.

Isu mengenai agama dan politik di Indonesia tidak pernah padam, selalu berkobar dan bergelora, berbagai cara dilakukan untuk memperoleh suara terbanyak salahsatunya dengan melibatkan agama. Setiap parpol berduyun-duyun mencari dukungan para pemimpin Islam,

tidak jarang mereka mendatangi pesantren-pesantren dan masjid-mesjid demi mendulang suara yang besar. Hal tersebut dilakukan karena Partai politik memiliki anggapan bahwa kemenangan akan dapat diraih dengan mudah asal agama yang dianut oleh calon pemimpin yang akan dipilih sama dengan agama mayoritas, sehingga tidak aneh jika calon seorang pemimpin berlomba-lomba memperlihatkan keimanan dan ketakwaannya untuk meraup jumlah suara yang banyak (Ratna dkk, 2021).

Harus dipahami bahwa manusia adalah khalifah yang merupakan pemimpin dalam mengelola dan mengatur roda pemerintahan untuk mencapai satu visi dan misi yang tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Swt. Hal ini bukanlah sebuah perkara yang mudah, bahkan perlu memperhatikan dari berbagai bidang. Dengan demikian pemahaman yang masih ada dalam pandangan masyarakat mengenai anti politik harus dihilangkan, karena bagaimanapun kita sebagai umat islam menganggap politik sebagai sebuah jembatan untuk mendapat kekuasaan, maka berhati-hatilah dalam memilih pemimpin jangan mudah tergiring opini.

Kekuasaan dalam konteks ini ditafsirkan sebagai pemegang kewenangan untuk mengatur, menyusun, melaksanakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui kekuasaan ini, mereka dapat menentukan arah, posisi, dan warna dari pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah. Posisi pemegang kekuasaan memiliki peran untuk menentukan jabatan-jabatan lainnya dalam bidang pemerintahan yang akan menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu.

Dari berbagai kajian dakwah mengenai politik, Ustadz Syehabudin menyampaikannya dengan berbagai cara agar bisa sampai ke dalam hati masyarakat sebagai pendengarnya, sehingga dengan Pendidikan yang dilakukan di majlis dakwah itu sedikit demi sedikit masyarakat bisa semakin terbuka pemikirannya dalam memandang dunia politik, tidak hanya sebatas pemilihan pemimpin dengan janji-janji manis nya saja melainkan harus berpikir seluas mungkin mengenai kriteria para pemimpin yang akan kita pilih.

Berangkat dari isu tersebut pula masyarakat semakin berfikir bahwasannya masih banyak hal-hal yang harus difikirkan secara jernih bukan hanya sibuk bergelut dalam konflik-konflik karena perbedaan pilihan pemimpin sampai berlarut hingga memutuskan tali silaturahmi, disalaneh sikap toleransi kita dapat terukur. Jika sudah memahami konsep toleransi dengan benar maka sebanyak apapun perbedaan pilihan, atau perbedan pendapat tidak akan menjadi masalah yang menimbulkan perpecahan atau bahkan sampai tercerai-berai karena akan ada gesekan-gesekan kepentingan yang boleh jadi akan

menimbulkan konflik horizontal bahkan kekerasan fisik antar sesama umat.

B. Relevansi Model Politik Ustadz Dalam Politik Modern

Ustadz syehabuddin mengatakan bahwa ustadz memegang peran sentral dalam menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat, memberikan pemahaman mendalam, serta menjadi panduan moral dan spiritual. Beberapa peran utama ustadz syehabuddin konteks ini yaitu sebagai pemberi Pendidikan agama bagi masyarakat yang memberikan wawasan dan pengetahuan mendalam mengenai ajaran-ajaran agama kepada masyarakat.

Ustadz menyampaikan pelajaran-pelajaran keagamaan dengan mengacu pada Al-Quran , Al-Hadist , kitab kitab kuning karangan ustadz dan tradisi keagamaan yang relevan.juga sebagai penjelas ajaran ajaran agama seperti hukum hukum ajaran islam sehingga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dengan jelas dan lugas tentang ajaran-ajaran keagamaan. Hal ini mencakup interpretasi yang benar terhadap Al-Quran , Al-Hadist , kitab kitab kuning karangan ustadz, pemahaman tentang praktik ibadah, dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih dari itu beliau menjelaskan Ustadz Sebagai pembimbing rohani, ustadz membantu individu dalam

menghadapi permasalahan dan cobaan hidup dengan memberikan pandangan spiritual. Ustadz menjadi sumber dukungan moral dan inspirasi untuk mengatasi tantangan kehidupan.

Melalui peran-peran ini, ustadz menjadi pilar penting dalam membimbing masyarakat menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama serta membantu mereka mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masa kini. bukan hanya berperan sentral terhadap mengajarkan, membimbing, menjadi tauladan tetapi menjadi role model dalam pandangan dan cara menyampaikan pesan-pesan politik terhadap masyarakat.

Jika kita melihat arah politik para tokoh agama dulu Peran tokoh agama yang kuat “dimanfaatkan” atau menjadi incaran para politisi untuk mendulang suara.

sehingga tidak jarang tokoh agama terlibat langsung dalam praktik politik, bahkan berbagai taktik dan strategi kampanye dikeluarkan demi menaikkan suara pasangan yang diusung maupun yang dijalankan partai politik. Keakraban tokoh agama dan politik mencerminkan dinamika yang menarik khususnya jika dilihat pada sebelum tahun 1945 (Agustino, 2008: 98).

Sebagai contoh dalam proses persiapan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara intens menyertakan peran besar tokoh agama

bahkan berkelanjutan di masa setelah kemerdekaan. Contohnya, dalam proses transisi politik dalam merebut kemerdekaan mencatat kontribusi besar tokoh agama seperti Hasyim Asyari,

TB Simatupang dan lain-lain, khususnya dalam membungkam pengaruh kekuatan politik kolonialisme dan komunisme yang bergerak masif pada penghujung Indonesia diploklamirkan.

Peranan penting seorang tokoh agama dalam kehidupan beragama di masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari ajaran-ajaran agama yang dibawanya sebagai pedoman hidup masyarakat. Merujuk dari realitas sosial inilah, diakui atau tidak, sosok tokoh agama, memiliki power serta otoritas yang cukup tinggi untuk menggerakkan massa. (Turmudi, 2003: 94).

Asumsi ini diperkuat dengan adanya fakta yang terjadi selama ini, seperti contoh pemilu, setiap partai peserta pemilu, mencoba memanfaatkan tokoh agama seperti ulama untuk meningkatkan perolehan suara partainya. Kharisma ulama yang memperoleh dukungan dan kedudukan di tengah kehidupan masyarakat terletak pada kemantapan sikap dan kualitas yang dimilikinya, sehingga melahirkan etika kepribadian penuh daya tarik.

Dalam konteks kehidupan pesantren, ulama juga menyandang sebutan elite yang memiliki otoritas tinggi dalam menyebarkan pengetahuan keagamaan di suatu

daerah. Peran tokoh Agama dijadikan kendaraan politik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik kekuasaan. (Abdullah, 2001: 210).

Agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembagakan, semua itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai ultimate meaning. (Jalaluddin, 2010: 24).

Peran tokoh agama dalam sistem sosial pada masyarakat Indonesia membuat posisi para kiai sangat penting. Kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, tokoh agama dalam hal ini ulama merupakan salah satu tokoh yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut, ulama menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang mempunyai pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. (Muhtadi, 2004:37) Ini menunjukkan pengaruh dari tokoh agama sangat berperan.

Hal ini juga diperkuat oleh ustadz bahwa untuk menjalankan agama islam yang diinginkan maka tokoh agama ulama ustadz harus berpolitik karena kekuasaan diawali dengan berpolitik dan itu yang terjadi diindonesia andai kata tokoh agama ustadz tidak ambil bagian dalam perpolitikan di Indonesia maka kita lihat di Asian game china 2023 ketika itu ada seorang penonton/suporter

muslim asal Uzbekistan sedang melaksanakan sholat di luar stadion ketika itu polisi yang berjaga menghadang, menyetop dan berusaha melarang orang itu untuk sholat sehingga menjadi viral di media social itu adalah bukti bahwa ketika agama Islam tidak menjadi mayoritas dan tidak diikuti sertakan dalam politik maka hal-hal seperti itu menjadi kenyataan yang pahit bagi umat Islam.

Berbagai macam cara dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Dapat disampaikan secara langsung, ataupun dengan perantara media lain. Demikian pula komunikasi politik ustadz dalam pembangunan, politik kenegaraan, dan ketika akan melibatkan diri dalam proses pembangunan. Beberapa diantara yang dapat dijadikan sebagai wahana komunikasi politik ustadz, antara lain adalah :

1. Menjadi elit politik praktis

Ketika harus menjadi elit politik praktis, ustadz akan menghadapi banyak tantangan dan godaan. Sama halnya dengan dakwah di tengah-tengah masyarakat, juga menghadapi banyak rintangan. Dalam hal ini, ustadz akan mampu menempatkan diri secara bijaksana, agar kehadirannya dalam politik praktis memberikan warna yang cerah dan sejuk, sehingga kegiatan politik yang dia lakukan memberikan manfaat untuk kepentingan dakwah itu sendiri demi kepentingan yang lebih besar.

2. Menjadi pejabat pemerintah.

Sebagai pejabat pemerintah, ustadz memiliki peluang untuk berkontribusi lebih nyata lagi karena berada dalam lembaga pemerintahan yang dapat mengambil kebijaksanaan dan mengatur proses pembangunan. Posisinya sebagai ustadz sekaligus sebagai pejabat pemerintah, tentunya akan dapat disinergikan. Sehingga dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai aparat negara, dibarengi dengan kapalitas ilmu agamanya sebagai ustadz yang dapat dirangkaikan dalam mengambil keputusan. Tugas sebagai aparat negara dan sekaligus sebagai ustadz, memiliki fungsi yang sama, yakni memberikan pelayanan dan pencerahan kepada segenap warga negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

3. Memberikan kontribusi pemikiran.

Peran ustadz dalam pembangunan dan politik kenegaraan juga dapat dilaksanakan dengan memberikan kontribusi pemikiran atas berbagai masalah yang dihadapi negara dan mencari jalan keluarnya. Pemikiran ustadz sangat diyakini oleh masyarakat karena ia bersifat obyektif dan dapat dipercaya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh ustadz itu adalah pemikiran untuk kepentingan masyarakat.

4. Mengontrol jalannya pembangunan.

Antara faktor yang menyebabkan gagalnya atau kurang berhasilnya suatu program pembangunan adalah karena kurang dalam pengawasannya. Pelaksana program pembangunan terkadang tidak mampu melihat sisi lemah dan kekurangan atas proyek yang dilaksanakan. Hal ini terjadi oleh berbagai macam faktor, apakah yang disengaja atau diluar dugaan. Fungsi ustadz adalah memberikan pengawasan dan nasihat kepada pelaksana pembangunan supaya ia bekerja dengan baik dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta menghindari segala bentuk kerugian kepada rakyat.

5. Mengarahkan pejabat yang profesional.

Kualitas sumber daya manusia pejabat pemerintahan dan elit politik akan memberikan pengaruh yang sangat penting dalam mensukseskan program pembangunan politik dan kenegaraan. Sumber daya yang memiliki sikap jujur, loyal dan memiliki akhlakul karimah atau moralitas yang baik, akan dapat melaksanakan tugasnya secara konsisten, objektif, dan profesional. Fungsi ustadz adalah mendidik dan melatih individu-individu yang mampu melaksanakan tugas sebagai aparat pemerintah yang profesional. Pendidikan di berbagai pondok pesantren yang dibina oleh para ustadz, menjadi salah satu wahana yang tepat untuk ini. Sebab pondok pesantren, disamping mendidik santri dalam pelajaran

keagamaan, juga dapat diarahkan untuk memahami berbagai pelajaran tentang kenegaraan dan kemasyarakatan lainnya.

C. Tantangan dan peluang bagi ustadz di politik dimasa depan

Tantangan utama dalam politik serangan fajar ketika ustadz menyampaikan atau memberikan fatwa terhadap masyarakat politisi atau timsesnya malah memberikan uang, atau barang barang yang dirasa bias mengambil hati masyarakat, maka banyak masyarakat yang lemah iman karena isi amplop ataupun sejenisnya di serangan fajar, sehebat apapun kiyai, ulama, ustadz ketika masyarakat yang lemah ekonomi disiram dengan uang maka akan sia-sia.

Terkait *money politic* atau biasa disebut politik uang, hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang ada dalam kontestasi politik. Politik uang menghadirkan dampak-dampak negative seperti Pertama pidana penjara dan denda. Kedua, menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Dan ketiga, politik uang dapat merusak paradigma bangsa.

Politik uang sudah sering dijumpai dalam pesta demokrasi. Padahal jelas-jelas sudah menjadi larangan. Ustadz ulama kiyai harus menggembar gemborkan

edukasi ke masyarakat terkait dampak-dampak negative terhadap kehidupan demokrasi.

Hukum positif, politik uang sudah jelas hukumnya, Dimana sudah termaktub dalam regulasi Pemilu maupun Pemilihan, yakni dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, bahwa politik uang dikategorikan seperti suap-menyuap. Dengan alasan pemberian politik uang terdapat adanya pengharapan imbalan, yakni pengaruh untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu. Dengan demikian, hukumnya sama seperti suap menyuap. Politik uang termasuk dalam kategori risywah. Dan risywah (suap) itu dilarang, baik pemberi maupun penerima. Dalam Qs. Al-Baqarah: 188 telah disebutkan dalil tentang suap

Pungkasnya, politik uang dikategorikan seperti risywah. Sedangkan risywah (suap) sendiri hukumnya haram. Maka, politik uang hukumnya haram. Hal tersebut sesuai kaidah ushul yang berbunyi,

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Serangan Fajar” merupakan istilah populer dari politik uang. Berdasarkan Pasal 515 dan Pasal 523 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 187 A ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa bentuk serangan fajar tidak terbatas pada uang.

Namun, juga dalam bentuk lain seperti paket sembako, voucher pulsa, voucher bensin, atau bentuk fasilitas lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di luar ketentuan bahan kampanye yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 dan 6 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018. Aturan mengenai bahan kampanye yang diperbolehkan oleh KPU dan bukan termasuk dalam serangan fajar dijelaskan secara rinci pada Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi: Bahan kampanye dalam bentuk selebaran/flyer, brosur/leaflet, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan atau alat tulis. Adapun pada ayat 6 yang berbunyi: Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000.

Kurangnya pemahaman mengenai pondasi dan substansi demokrasi mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia melihat demokrasi sekadar sebagai ritual (pemilu, pemungutan suara, voting, kebebasan berpendapat, dan sebagainya) sedangkan relevansinya terhadap perbaikan kualitas kebijakan publik cenderung diabaikan. Selain itu melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap para wakilnya karena dianggap bahwa semua wakil hanya mengumbar janji, sehingga selama mereka mendapatkan keuntungan kenapa tidak diambil, maka kesemuanya ini menyebabkan politik uang semakin

merajalela dan seolah-olah tidak ada yang salah dengan itu. (Wahyudi Kumorotomo,2009)

Mengingat bahaya yang ditimbulkannya, maka soal politik uang dalam pemilu ini penting untuk diangkat sebagai tulisan guna memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penolakan terhadap tawaran politik uang dan apabila mungkin ikut serta memerangi politik uang tersebut, pendekatan yang bisa dilakukan tersebut antara lain melalui pendekatan keagamaan, terutama agama Islam, karena dalam Islam semua hal dalam kehidupan ini diatur secara lengkap, dan pentaatannya pun akan dilaksanakan oleh pemeluknya secara sukarela. (Zen, H. R. ,2017).

Istilah politik uang ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan (Ebin Danius, 1999). Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan. Adapun yang dimaksud dengan pemilu ialah pemilihan atas para wakil rakyat baik yang akan menduduki jabatan di lembaga legislatif seperti Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota, serta wakil rakyat yang menduduki

jabatan eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Bukan hanya terjadi dalam pemilukada saja, bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik politik uang di masyarakat telah berlangsung dari pemilu ke pemilu. Hal itu biasa dilakukan oleh para kandidat maupun parpolnya dengan beragam cara, baik dengan cara konvensional berupa pemberian berbentuk uang, baik itu sedekah yang biasa dikenal dengan serangan fajar maupun transportasi kampanye, pemberian sembako seperti beras, minyak dan gula kepada masyarakat, pemberian dalam barang seperti alat ibadah, fasilitas sosial, pemberian kupon yang akan diuangkan pasca pemilu dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya kepada peserta pemilu yang bersangkutan. Praktik politik uang ini banyak dilakukan oleh peserta pemilu. Ironisnya, praktik ini tidak tersentuh oleh penegakan hukum akibat sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah.

Hal ini bisa dibuktikan dari hasil polling Litbang Harian Kompas menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan calon anggota legislatif maupun partai politik.¹⁴ Bahkan banyak anggota masyarakat menganggap politik uang sebagai rejeki musiman yang sayang ditolak. Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan

masyarakat yang makin permisif dan menganggap bahwa politik uang tersebut sebagai biaya ganti rugi dari para kontestan karena pada hari pemilihan mereka tidak pergi ke ladang ataupun sawahnya. Bisa juga politik uang itu dianggap sebagai kesempatan mendapatkan rejeki, karena bagi mereka siapapun yang terpilih tidak bermakna apapun bagi diri dan kelompoknya (Zen, H. R., 2017).

Selanjutnya tantangan ustadz ulama kiyai masa kini dan masa depan yaitu Kompleksitas Politik Islam Situasi yang dihadapi Indonesia hari ini, sebagaimana terefleksi dari persepsi dan pandangan ulama mengenai negara-bangsa, tidak saja menunjukkan masih adanya beberapa gugatan dan ketidaknyamanan terhadap negara-bangsa tapi juga mencerminkan kompleksitas politik Islam (Muslim politics) yang berkembang di tengah arus deras perubahan sosial dan terjangan globalisasi. Dalam konteks Indonesia transisi demokrasi di era Reformasi mendorong hadirnya simbol-simbol Islam secara lebih mencolok di arena politik, menyertai berkembangnya politik identitas.

Kehadirannya semakin menonjol seiring pelembagaan demokrasi dan politik elektoral yang memungkinkan simbol-simbol tersebut diappropriasi dalam kontestasi politik yang menuntut dukungan langsung masyarakat. Simbol-simbol Islam bukan saja menjelma menjadi variabel penting dalam kehidupan keseharian masyarakat kotakota besar yang semakin

bersemangat mengkonsumsi simbol-simbol tersebut melalui keikutsertaan mereka dalam pengajian, tabligh akbar, dan berbagai acara keagamaan lainnya, tapi juga berkembang sebagai atribut-atribut politik yang utama dalam kontestasi elektoral. Sulit menghindari adanya kesan paradoksal yang menghingapi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Di satu sisi, demokrasi semakin berkembang sebagaimana ditandai kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat serta penyelenggaraan Pemilu yang relatif bebas.

Namun di sisi lain, semakin banyak masyarakat Indonesia yang berusaha menyatakan secara terbuka identitas keagamaan mereka, membuat perbedaan, dan membuka ruang publik baru yang bersesuaian dengan tuntutan keagamaan dan gaya hidup Islami dengan mengkonsumsi simbol-simbol Islam, yang terjadi bersamaan meningkatnya intoleransi. Tambahan lagi, ruang politik berkembang semakin terbuka yang memungkinkan elite-elite politik oligarkik memainkan segala macam jurus untuk meraih dukungan konstituen dan mendominasi cengkeraman kekuasaan politik.

Mereka bukan hanya aktif menggelindingkan wacana-wacana politik yang bernuasa konspiratif tapi juga tidak ragu-ragu memainkan simbol-simbol agama serta politik uang. Dale Eickelman dan James Piscatori (1996)

telah lama menunjukkan kompleksitas politik Islam. Mereka mendefinisikannya sebagai politik yang diwarnai persaingan (*competition*) dan tawar-menawar (*bargaining*) melalui interpretasi dan pemaknaan atas doktrin-doktrin dan simbolsimbol keagamaan demi mendukung klaim politik mereka masing-masing. Kontestasi tersebut melibatkan baragam aktor, dari pelajar-pelajar sekolah di Prancis yang datang ke sekolah memakai jilbab, intelektual dan aktivis Islamis berpendidikan tradisional dan Barat, orang-orang kebanyakan yang terlibat dalam kegiatan dakwah dan layanan filantropi keislaman, sampai para pejabat pemerintah yang memainkan berbagai jurus keagamaan dalam menjalankan tugas politik, birokrasi dan administrasi mereka.

Aktor negara dan non-negara serta antar aktor dalam masing-masing kategori tersebut berada dalam pusaran inti persaingan dalam arena politik yang digambarkan Eickelman dan Piscatori selayaknya pasar (*marketplace*). Dalam konteks ini pendidikan massal dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, berperan penting dalam penyebaran dan fragmentasi otoritas keagamaan. Persepsi dan pandangan ulama tentang negara-bangsa masa kini, sebagaimana digambarkan di atas, jelaslah tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik Islam. Pilihan mereka

untuk mendukung atau menolak, mendukung dengan beberapa reservasi, dan menolak dengan tingkat penolakan bervariasi terhadap negara-bangsa mencerminkan keterlibatan mereka dalam kompetisi untuk memberikan makna dan interpretasi atas doktrin-doktrin dan simbol-simbol agama dalam konteks memperebutkan klaim politis masing-masing. Kompetisi tersebut berlangsung sangat intensif sebagaimana terlihat dari keragaman yang semakin kompleks dari komposisi ruang publik keagamaan, yang dalam penelitian ini ditunjukkan oleh luasnya spektrum pandangan ulama.

Perbedaan pilihan dalam spektrum itu mencerminkan usaha mereka menegosiasikan posisi masing-masing berhadapan dengan negara, di satu sisi, 53 Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia dan dengan ulama-ulama lain yang berbeda pandangan dan kepentingan, di sisi lain.

Fakta bahwa tidak banyak ulama yang secara progresif menerima negara-bangsa, dalam pengertian mengakui totalitas sistem negara-bangsa dan seluruh prinsip turunannya, menunjukkan adanya tantangan bagi ulama untuk tidak saja menjaga relevansi mereka dalam konteks kehidupan negarabangsa, namun juga memahami dan mengaktualisasikan posisi mereka dalam kehidupan kekinian. Demikian halnya fakta bahwa hanya sedikit ulama yang benar-benar menolak negara-bangsa

menunjukkan keinginan mayoritas mereka untuk tetap berada dalam kerangka negara-bangsa walaupun banyak yang semakin ragu dengan relevansi diri mereka dalam dinamika kehidupan negara-bangsa yang berubah dengan cepat. Keraguan itu mereka ekspresikan dengan reservasi yang berbeda-beda tingkatannya, tergantung pada pengalaman masing-masing serta dinamika yang terjadi pada konteks lokal, nasional dan internasional.

Tantangan *cyber politics* dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terutama didukung oleh komputer dan jaringan internet, sebagai sarana kegiatan politik dan pemerintahan. Banyak politisi sekarang memanfaatkan dunia *cyber* untuk kepentingan politik dalam pemilihan umum parlemen dan kepala daerah dengan membuat situs web pribadi dengan foto-foto keluarga mereka dan salinan pidato mereka. Namun sebenarnya yang telah dilakukan para politisi itu belum cukup dalam hal mereka ingin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (internet) untuk kepentingan politiknya.

Dengan munculnya internet sebagai media baru, ada banyak harapan tentang dampaknya terhadap peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat. Gagasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, menawarkan kesempatan untuk memperluas partisipasi politik telah dibahas dalam banyak kerangka politik dari sistem totaliter

hingga demokratis. Akibatnya, muncul determinisme teknologi yang berkaitan dengan kehidupan politik di dunia maya. Demokrasi modern bergantung pada prinsip partisipasi dan representasi. Internet dengan fitur-fitur konektivitas dan interaktivitas memfasilitasi “*mediated democracy*”, dimana publik dan elite politik dapat dalam arti teoretis berkomunikasi tanpa hambatan dan distorsi dari media konvensional.

Gagasan tentang masuknya internet pada ranah publik banyak mendapatkan kritik, karena teknologi belum tentu dapat memperbaiki masalah apatisisme politik dan juga tidak dapat mendorong partisipasi politik masyarakat. Masalah intinya tetap terkait dengan peluruhan demokrasi. Dan, jika semua orang mengambil bagian dalam proses politik (pemilihan umum) mungkinkah pemerintah dapat menghadapi semua umpan-balik yang akan muncul. Internet dengan media barunya memiliki potensi untuk menantang wacana dominan dari pemerintah dan media tradisional, dan memberikan ruang bagi para pembangkang platform global untuk menyebarkan pandangan mereka. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana Ben Ali di Tunisia dan Hosni Mubarak di Mesir yang tumbang karena tak mampu membendung gejolak dan pergerakan yang diawali di media sosial.

Di masa ini masa yang sangat istimewa di mana semua orang bisa mendapatkan dan mengerjakan sesuatu dengan sangat mudah. Mungkin di zaman sebelum penemuan media elektronik ada, orang tersebut harus memerlukan beberapa kitab-kitab atau refensi-referensi buku. Sedangkan di era digital ini orang tinggal mencari sesuatu yang diinginkan atau ilmu dan hadist-hadist shohih tinggal mencari di salah satu situs internet semua akan muncul dengan sangat banyak refensi dan model. Pada era ini adalah puncak dimana semuanya yang serba instant yang banyak di nikmati dan seorang ustadz (*Mubaligh*) pun bisa berdakwah atau menyampaikan dakwahnya melalui media-media yang ada seperti berdakwah dengan media televisi, radio, dan juga media tulisan. Realita yang ada banyak sekali ustadz yang sudah memanfaatkannya terutama dalam pertelefesian.

Terkadang terfikirkan ternyata tidak hanya artis saja yang ingin masuk televisi, bahkan para ustadz pun juga banyak, hingga menjamur dimana-mana. Bagus ketika bertujuan untuk menegakkan ajaran, dan syariatnya tetapi apakah itu saja kenyataannya. Diera ini mereka mendapatkan perilaku yang nyaman, rasa tentram karena fasilitas yang ada. Pada umumnya, dakwah yang dilaksanakan dalam sebuah majelis taklim di sebuah surau, masjid atau musholla berlangsung dalam suasana sakral dan khidmat. Kemajuan teknologi dan informasi,

memungkinkan seorang ustadz untuk berimprofisasi dengan selingan humor dan hal-hal lain, agar materi ceramahnya tetap menarik untuk disimak. Mengingat tantangan dakwah di era teknologi dan informasi, khususnya media memang tidak bisa dilepaskan dari wahana hiburan. Dampaknya, orientasi dakwah yang diperankan para ustadz, juga semakin berkembang, bahkan cenderung menjadi bias.

Semula, dakwah yang lebih banyak bersentuhan dengan ranah ibadah, selalu dilandasi dengan niat dan motivasi untuk beribadah pula, yakni dilaksanakan dengan penuh suka cita, hati yang ikhlas dan hanya mengharap ridla Allah Swt semata. Namun, dalam perkembangannya pola berdakwah melalui media sebagai wujud kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi tersendiri bagi seseorang ustadz. Pengaruh media, memungkinkan seorang ustadz memperoleh popularitas di mata pemirsanya seperti layaknya seorang selebriti (publik figur) dan tidak menutup kemungkinan pula setiap kegiatan dakwahnya, sering dinilai dengan materi. Dakwah bagi umat Islam, sesungguhnya menjadi kewajiban yang menyeluruh. setidaknya, umat Islam yang dimaksud adalah yang termasuk dalam kategori (*mukallaf*) individu yang sudah bisa dikenai beban tanggung jawab dan (*mumayyiz*) individu yang telah mampu membedakan antara yang benar dan salah, serta antara baik dan buruk. Kewajiban

dakwah Islam ini ada yang bersifat individual secara pribadi dan masing-masing ada yang berbentuk kolektif melalui kelompok, jamaah atau organisasi. Dengan demikian menjadi umat Islam pada hakekatnya berkewajiban untuk berdakwah. Menjadi muslim bisa diidentikkan sebagai ustadz, atau juru dakwah menurut proporsi dan kapasitas masing-masing. Dalam ruang lingkup kewajiban berdakwah yang luas itu, sebuah hadist mengatakan: “*Ibda’ binafsika tsumma biman ta’ula*”, mulailah kewajiban kewajiban agama itu dari dirimu sendiri, baru kemudian kepada orang-orang disepitarmu. Di samping itu Al-Quran juga menegaskan untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka (QS. at-Tahrim: 6).

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, kewajiban berdakwah kemudian diperankan oleh para pengemban risalah Nabi Muhammad Saw., yakni para ulama, ustadz, atau mubaligh. Karena tugas menyampaikan risalah agama itu harus dilakukan secara tertib dan kontinu, sehingga memerlukan keahlian dan pemahaman keagamaan yang lebih baik, disamping ketentuan-ketentuan lain, sehingga tidak setiap orang Islam mampu berdakwah. Persoalannya, zaman terus berubah, sehingga pola dan metode berdakwah yang dilaksanakan para juru dakwah juga ikut berubah. Tidak terkecuali pola dan model dakwah yang

dikembangkan para ustadz di era teknologi komunikasi dan informasi seperti sekarang ini.

Pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, dakwah harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Pada kenyataannya dakwah Islam itu tidak bebas dari berbagai kendala dan tantangan. Realitas dakwah Islam menjadi problem keagamaan yang krusial dan terkadang dilematis.

Terlebih lagi, bila kita mengamati dakwah Islam di era teknologi dan informasi seperti sekarang ini, maka tantangan dan kendalanya akan semakin kompleks. Dewasa ini, setidaknya tantangan dakwah Islam tersebut berkaitan dengan akses globalisasi dan kenyataan pluralitas agama. Kemajuan pesat iptek telah mentransformasikan peradaban manusia dari kultur pertanian ke industri kemudian ke abad informasi dan komunikasi.

Berbagai masalah yang timbul karena pengaruh era teknologi dan informasi, diantaranya: Pertama, budaya dan gaya hidup serba seragam dengan tanpa mempertimbangkan urgensinya, seperti pada menu makan, mode pakaian dan kesenangan hiburan. Kedua, infiltrasi budaya dan tata nilai asing yang lebih intens dan

masif yang banyak bertentangan dengan identitas kepribadian bangsa dan moral agama, seperti melalui televisi dan film. Ketiga, dengan mengutip Mike Featherstone, adalah merebaknya konsumtivisme yang menggiring umat manusia kepada pemiskinan spiritual dan falsafah hidup hedonistik. (Asep Purnama Bahtiar, 2005)

Secara umum, definisi dakwah yang dikemukakan para ahli menunjuk pada kegiatan yang bertujuan perubahan positif dalam diri manusia. Perubahan positif ini diwujudkan dengan peningkatan iman, mengingat sasaran dakwah adalah iman. Dakwah sering dipahami sebagai upaya untuk memberikan solusi Islam terhadap berbagai masalah dalam kehidupan. Untuk itu dakwah harus dikemas dengan cara yang menarik dan tampil secara aktual, faktual dan kontekstual. Dimana aktual berarti dapat memecahkan masalah-masalah yang kekinian dan hangat di tengah masyarakat. Faktual berarti konkret dan nyata, sedangkan kontekstual dalam arti relevan dan menyangkut problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Agama Islam sebagai suatu ajaran tidaklah berarti, manakala manusia tidak dimanifestasikan dalam perbuatan amalia. Ini dikarenakan agama tersebut, bukanlah agama yang semata-mata menyoroiti satu sisi dari kehidupan manusia saja, akan tetapi Islam meliputi dan

menyoroti semua persoalan hidup manusia secara total. Pengertian dakwah tidak lain adalah komunikasi, hanya saja yang secara khas dibedakan dari bentuk komunikasi yang lainnya terletak pada cara dan tujuan yang akan dicapai. Didalam komunikasi mengharapkan adanya partisipasi dari komunikan atas ideaidea atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak komunikator sehingga dengan pesan-pesan yang disampaikan tersebut terjadilah perubahan sikap dan tingkahlaku yang diharapkan. Dakwah merupakan proses komunikasi, tetapi tidak semua proses komunikasi merupakan proses dakwah.

Kegiatan dakwah akan dapat berjalan secara efektif dan efisien harus menggunakan cara-cara yang strategis dan tepat dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Swt., Salah satu aspek yang bisa ditinjau adalah dari segi sarana dan prasarana dalam hal ini adalah media dakwah, karena dakwah merupakan kegiatan yang bersifat universal yang menjangkau semua segi kehidupan manusia, maka dalam penyampaiannya pun harus dapat menyentuh semua lapisan atau tingkatan baik dari sudut budaya, sosial, ekonomi, pendidikan dan kemajuan teknologi lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga cara berdakwah pun sekarang mengalami perkembangan. Dakwah tidak lagi dilakukan secara sederhana tdak hanya sebatas diatas mimbar, di masjid-masjid atau 25 Tantangan Dakwah di Era Teknologi dan Informasi AT-

TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam mushala tetapi mulai memanfaatkan kemajuan media teknologi. Hal ini dilakukan agar dakwah lebih meluas dan agar dakwah bisa dilakukan lebih efektif. Dakwah bisa dilakukan melalui media massa dan diterima oleh orang banyak. Karena sifatnya massal maka penerima pesan dakwah tidak hanya dikalangan tertentu saja. Kalangan yang dijangkau bisa luas begitu pula dampak yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu, kini berdakwah mempunyai tantangan sendiri. Media komunikasi dalam berdakwah pun terbagi menjadi dua yaitu, memanfaatkan jalur cetak. Selain itu ada pula yang bersifat elektronik, yang merupakan implikasi dari kemajuan media teknologi. Media komunikasi cetak misalnya surat kabar, majalah, selebaran dan lain sebagainya. Sedangkan media komunikasi elektronik misalnya pesawat televisi, dan yang paling mutakhir adalah internet. Dakwah Islam sebagai konsep maupun sebagai aktifitas telah memasuki seluruh wilayah dan ruang lingkup kehidupan manusia, sehingga seluruh aspek kehidupan tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang dakwah itu sendiri. Sejalan dengan pengertian dakwah sebagai nilai-nilai Islam kedalam semua aspek kehidupan manusia. Lebih lanjut ia tegas bahwa makna dakwah itu sendiri tidak hanya sebatas tabligh seperti yang berlangsung dan mendominasi aktifitas dakwah selama ini.

Dakwah melalui internet merupakan suatu inovasi terbaru dalam syiar Islam, dan tentunya akan memudahkan para ustadz dalam melebarkan sayap-sayap dakwahnya. Penggunaan media internet sebagai media dakwah merupakan kesempatan dan tantangan untuk mengembangkan dan memperluas cakrawala dakwah Islamiyah. Kesempatan yang dimaksud ialah bagaimana orang-orang yang peduli terhadap kemampuan dakwah maupun memanfaatkan media internet tersebut sebagai sarana dan media dakwah untuk menunjang proses dakwah Islamiyah.

Sementara mewujudkannya mulai dari tenaga, pikiran dan sumber daya manusia yang mengerti akan dakwah dan internet. Umat Muslim harus mampu menguasai dan memanfaatkan sebesar-besarnya perkembangan teknologi informasi, "Dari sisi dakwah, kekuatan internet sangat potensial untuk dimanfaatkan. Tantangan dakwah beraneka ragam bentuknya, selama ini kita mengenal dalam bentuk klasik, bisa pada penolakan, cibiran, cacian maupun teror bahkan sampai pada tataran fitnah. Banyak para ustadz mampu mengatasi tantangan atau rintangan tersebut dengan baik baik karena niatnya memang telah kuat sebagai pejuang. Meski demikian ada pula yang tidak mampu untuk mengatasinya sehingga tersingkir dari kancah dakwah. Jalan dakwah bukan rentang yang pendek dan bebas hambatan, bahkan jalan

dakwah sebenarnya penuh dengan kesulitan, amat banyak kendala dengan jarak tak terkira jauhnya.

Tabiat ini perlu diketahui dan dikenali setiap aktivitas dakwah, agar para juru dakwah bersiap diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi diperjalanan sehingga revolusi informasi dan komunikasi di jalan dakwah bisa kita atasi. Allah Swt., Telah memberikan rambu-rambu kepada kita tentang hal ini: Apakah manusia mengira bahwa mereka sedang dibiarkan (saja) mengatakan, “Kami telah beriman,” sedang mereka diuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Ia mengetahui orang-orang yang berdusta. (Al-ankabut: 2-3).

Ujian tersebut sesungguhnya diperlukan oleh orang-orang mukmin justru untuk meningkatkan kapasitasnya. Adanya ujian dan kendalakendala riil ditengah kehidupan ini akan terbukti siapa saja yang yang benar pengakuannya dan siapa pula yang dusta. Problematika yang dihadapi para aktivitas dakwah di medan dakwah terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Disini akan kami diungkapkan beberapa hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan merupakan kendala yang bersifat internal, yaitu gejala kejiwaan, ketidak seimbangan aktivitas, latar belakang dan masa lalu, penyesuaian diri (Sundari, 2005)

Belajar dari hal tersebut, para aktivis dakwah harus mampu menyesuaikan dan mengelola kendala internal dalam dirinya terlebih dahulu, agar bisa optimal menunaikan amanah dakwah. Ada beberapa hal dalam problematika internal aktivis

1. Gejolak Kejiwaan

Para aktivis dakwah adalah manusia biasa yang lengkap seluruh unsure kemanusiaannya. Wajar jika mereka memiliki permasalahan kejiwaan. Mereka bisa merasakan sedih, senang, kecewa, dan bangga. Bahkan terkadang bingung, cemas, gelisah, marah namun ada saat tenang dan gembira. Di dalam diri manusia terdapat ada banyak potensi yang mengarahkan kepada kebaikan manusia, namun ada juga yang mengarah pada potensi yang membawanya kepada keburukan, dengan demikian tergantung dari masing-masing manusia dalam mengalokasikan potensi tersebut. Sebagai manusia biasa, setiap aktivitas dakwah memiliki peluang untuk mengalami berbagai gejolak dalam dirinya. Jika tidak dikelola secara tepat maka gejolak ini bisa berdampak negative dalam kegiatan dakwahnya bahkan dalam kondisi tertentu bisa menghancurkan citra aktivitas dan dakwah itu sendiri.

2. Gejolak Syahwat

Menurut Cahyadi banyak potensi dalam setiap jiwa manusia bisa menyeretnya ke jalan kefasikan, misalnya masalah syahwat. Sebenarnya syahwat ini merupakan potensi fitrah yang dikaruniakan Allah SWT kepada manusia, namun ternyata banyak manusia yang terpeleket ke dalam jurang kehinaan dan kemaksiatan karena menuruti atau memperturutkan keinginan syahwatnya (Cahyadi, 2010:3)

Bukan hanya manusia, bahkan para pengemban aktivis dakwah juga memiliki peluang terjebak dalam gejolak syahwat. Allah SWT syahwat sebagai sebuah kenyataan naluriyah, setiap manusia memilikinya: Dijadikan indah pada pandangan manusiakecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik / surga (Ali-Imran, 14)

Gejolak kejiwaan dalam hal syahwat ini muncul dengan sendirinya tanpa mengenal batas usia, meskipun akan tampak lebih kuat terjadi pada usia muda. Oleh karena itu bagi aktivis dakwah atau juru dakwah, gejolak ini harus ditanggapi dengan

serius, sebab apabila dibiarkan akan dapat menimbulkan kecendrungan yang bisa menjerumuskan.

3. Gejolak Amanah

Kadang gejala jiwa disisi yang lain muncul ketika menangani kasus-kasus medan dakwah. Permasalahan dakwah sering memancing munculnya gejala kemarahan dalam jiwa para aktivis dakwah, yang jika tak terkendali akan memunculkan letupan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Pada kondisi seperti ini perasaan yang lebih dominan, pertimbangan akal sehat bahkan perhitungan manhaj dakwah menjadi terabaikan.

Tentu saja hal ini merupakan peluang bagi munculnya penyimpangan manhajiyah dalam gerak dakwah, sekaligus membuka celah tak menguntungkan bagi kondisi juru dakwah itu sendiri. Kadang-kadang gejala kejiwaan yang muncul pada diri juru dakwah dalam melihat suatu keadaan, baik di medan dakwah maupun pada penataan gerak dakwah itu, membuka peluang kearah terjadinya fitnah dikalangan muslim sendiri. Apabila gejala ini tidak segera diselesaikan, bisa menimbulkan kereawanan hubungan yang membahayakan gerakan dakwah itu sendiri. Di sini tampak peranan penting seorang juru dakwah dalam

menyelesaikan gejala tersebut. Satu sisi akan memberikan peringatan, bahkan bisa jadi berupa hukuman kepada person yang melanggar. Sementara di sisi lain mampu menyelesaikan urusan akibat gejala yang muncul.

4. Gejala Heroisme

Kadang di jumpai sebuah semangat yang sangat heroik di medan perjuangan, apabila tatkala berada dalam peperangan menghadapi musuh. Semangat kuat yang muncul dari sikap heroisme para petarung adalah mengalahkan dan menahklukan musuh. Pada titik tertentu bahkan itu menjadi semacam obsesi kepahlawanan. Namun jika gejala ini tidak diletakkan secara tepat bisa pula berdampak negatif.

5. Gejala Kecemburuan

Kita ingat kisah pembagian harta rampasan pada perang Hunain. Sesuai perang Hunain Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan kepada yang berhak secara adil dan bijaksana. Namun Abu Sufyan bin Harb, tokoh penentang islam sejak awal dakwah di Makkah telah mendapat bagian 100 ekor unta dan 40 uqiyah perak. Demikian pula Yazid dan Mu'awiyah, dua orang anak Sbu Sufyan mendapat bagian yang sama dengan bapaknya. Kepada tokoh-tokoh yang Quraisy yang lain beliau

memberikan bagian 100 ekor unta. Ada pula yang mendapat bagian lebih sedikit dari itu, sehingga seluruh harta rampasan habis dibagi-bagikan. Melihat pembagian itu, muncullah gejala kemburuan sampaisampai sahabat anshar berkata, “ mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada Rasul-Nya karena beliau sudah membagi-bagikan dan member kepada orang Quraisy dan tak memberi kepada kami, padahal pedang-pedang kami yang meneteskan darah-darah mereka.

Sebenarnya sikap yang di tunjukkan oleh sahabat anshar dalam pembagian harta rampasan atau ghanimah itu sebenarnya lebih disebabkan karena perasaan takut kehilangan perhatian Rasulullah, bukan sekadar karena tak mendapatkan bagian. Namun akhirnya mereka sadar bahwa cara pembagian Rasulullah atau lebih berdasar karena strategi dakwah beliau menghadapi orang-orang yang baru masuk islam atau melunakkan hati mereka yang dulu amat keras menghambat gerak dakwah islam. (Cahyadi, 2010:2)

Karakteristik Dakwah Agar tidak salah melangkah, seorang ustadz harus mengetahui karakteristik dakwah yang akan ia jalankan. Dakwah ibarat air sungai yang harus mengalir setiap saat. Ia tak boleh berhenti sedetik pun. Seandainya ia berhenti, berarti ia sedang mengumpulkan

strategi untuk melanjutkan perjalanan dengan napas panjang dan kekuatan baru yang lebih besar.

Kadang pula ia harus berpisah untuk mencari celah yang bisa ia lalui. Kadang ia juga harus berkumpul untuk melangkahi batu besar yang ada di depannya. Begitulah dakwah. Agar perjalanan dakwah mudah dan tak mengalami hambatan. Seorang ustadz harus mengetahui apasaja karakter dakwah. Dengan demikian ia bisa lebih mudah mengarahkan dakwahnya sesuai dengan karakter yang ia miliki. Adapun ciri karakteristik dakwah, antara lain Rabbaniyah (bernuansa ketuhanan).

Apa pun bentuknya, dakwah harus berorientasi pada nuansa ketuhanan. Di mana ajarannya harus mengacu pada satu titik, yaitu menyembah Allah SWT. Metode bisa beragam tapi sasarannya cuma satu. Dalam sejarah seluruh dakwah para Nabi mengajak pada satu muara yaitu meng-Esakan Allah. Allah berfirman : Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. (QS Ali Iman: 79).

Orientasi ketuhanan ini menjadi penting ketika dakwah harus berbenturan dengan segala kepentingan

duniawi. Di mana periode dakwah sudah merambah ke beragam sisi, jika tidak diwaspadai bisa menyeret para ustadz keluar dari rel rabbaniyah. Tak sedikit di antara juru dakwah yang tidak kuat menahan godaan, sehingga “menuhankan” harta atau jabatan. Segalanya dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah Swt.,

Tantangan ustadz dalam berpolitik adalah harus Wasatiah, Seimbang, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu sedikit. Memberikan hak pada setiap yang berhak, menunaikan keperluan setiap yang memerlukan sesuai dengan kadarnya, (berislam sebelum berjamaah). Ini penting bagi para pendakwah, dan tidak ada salahnya membentuk beberapa jamaah.

Bahkan sekarang ini kondisi umat yang tercerai berai, justru lebih menuntut masyarakat untuk hidup berjamaah. Menyatukan umat dalam simpul jamaah, tentu jauh lebih mudah daripada mengumpulkan mereka satu demi satu. Diibaratkan mengumpulkan dedaunan. Hal tersebut tentu akan lebih mudah kalau dedaunan itu sudah terkumpul dalam beberapa kelompok, daripada menyatukannya dalam kondisi tercerai-berai atau berhamburan.

Begitulah gambaran urgensi dari berjamaah. Namun jamaah bukanlah segalanya, karena ia hanyalah suatu sarana. Karenanya, aplikasi nilai-nilai keislaman harus menjadi prioritas. Ia tak boleh dikalahkan oleh

kepentingan berjamaah. Oleh karena itu seorang ustadz harus betul-betul ber-islam sebelumnya berjamaah. Dimana ia harus bangga dengan islam, bukan dengan jamaah atau kelompoknya. Allah berfirman : yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiaptiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. (QS Ar Ruum: 32).

Dalam ayat lain Allah menyatakan: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS Ali Imran: 103).

Tantangan selanjutnya ustadz harus *Syumuliyah*, Utuh dan menyeluruh dalam manhajnya (komprehensif), tidak *juz'iyah* (sebagian). Dakwah memang memerlukan tahapan tapi tetap harus koprehensif. Ia tak boleh setengah-setengah. Ajaran islam harus disampaikan secara keseluruhan. Tahapan hanyalah metode. Di antara ciri dakwah yang komprehensif adalah berkesinambungan,

saling terkait, dan tidak bertentangan. Ia tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika membahas masalah politik, ia tak melupakan masalah aqidah dan akhlaq. Dalam berpolitik, dua sisi ini tak boleh diabaikan. Begitu juga ketika membahas masalah fiqh, tak boleh berlawanan dengan kondisi politik. Allah berfirman: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS Al Baqarah: 208).

Begitupun dengan Mu'ashirah (modern)/modernisasi dalam menyampaikan ajaran agama ustadz dituntut untuk bias beradaptasi menyelaraskan . Dakwah harus mengikuti perkembangan zaman. Jika tidak ia akan ditinggalkan peminatnya. Kemajuan teknologi dan system komunikasi seperti sekarang seharusnya mendukung dakwah, bukan justru sebaliknya.

Sangat ironis misalnya seorang ustadz yang tak mengenal dunia internet, tak bisa mengirim email, atau gagap mengoperasikan computer. Padahal, di masa sekarang kemajuan teknologi seperti itu sudah menjadi kebutuhan. Namun demikian, bukan berarti dakwah harus kehilangan aslah (keasliannya). Kemajuan zaman dan teknologi tak boleh mengilas nilai-nilai Islam. Dakwah Islam itu lentur tapi tak boleh luntur, ia boleh membaaur tapi tak boleh mencampur.

Tentu juga Waqi'iyah, Realistik dalam melakukannya individu dan masyarakat. Mengambil kira keadaan setempat dan bertindak sesuai dengannya. Syariat islam mengenal batas territorial.karenanya, dakwah pun mesti mendunia. Belahan bumi mana pun yang dipijak, di situlah tanah air umat islam. Untuk itu konsep dakwah yang ditawarkan mesti menjangkau seluruh kepentingan umat islam di mana pun berada.

Masalah Palestina, Irak dan belahan bumi lainnya, harus menjadi perhatian umat. Namun demikian mesti ada skala prioritas. Konsep dakwah harus tetap membumi dan menyentuh persoalan masyarakat.

Ustadz itu harus Ilmiah. Dakwah *islamiyah* harus berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Dakwah yang tidak berlandaskan ilmu pengetahuan hanya akan menjadi boomerang dan selanjutnya ditinggalkan objek dakwah. Allah berfirman: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (QS Al Isra': 36).

Inqilabiyah (perubahan total), bukan tarqi'iyah (tambal sulam). Proses perubahan yang dilakukan dalam dakwah hendaknya dilakukan secara total dan menyeluruh. Di sinilah makna komprehensif menemukan pasangannya. Namun demikian, tetap saja perubahan total

harus dilakukan secara bertahap dan alami. Sebaliknya, dakwah tak boleh dilakukan dengan kaku.

Total yang dimaksud, bahwa dakwah harus meliputi segala lini masyarakat. Dakwah tak boleh hanya menyentuh kalangan elit saja dan melupakan rakyat jelata. Keduanya mesti mendapat perhatian. Kalangan elit punya kelebihan secara kualitas, sedangkan rakyat jelata mempunyai cakupan yang besar secara kualitas.

Al-mana'atun al-islamiyah (mempunyai imunitas keislaman). Ini penting bagi dakwah. Imunitas keislaman akan menjadi benteng bagi dakwah. Tingkat pertahanan dakwah ditentukan oleh sebesar apa imunitas yang dimiliki para penyebarannya. Begitulah karakter dakwah.

Dengan mengetahui beragama elemen itu, para ustadz akan bisa menapaki rel dakwah dengan cara yang benar. Kedelapan elemen itu ibarat suluh yang bisa menerangi jalan para ustadz agar bisa melangkah dengan pasti. Tak lagi meraba-raba. Dakwah di tengah kehidupan masyarakat pasti akan berhadapan dengan sejumlah kendala, tantangan, hambatan dan bahkan ancaman. Apalagi ketika dakwah sudah memasuki wilayah kelembagaan politik dan kenegaraan, akan lebih banyak lagi tantangan yang harus dihadapi.

Para ustadz harus memiliki karakter yang kuat agar bisa mensikapi berbagai tantangan tersebut dengan tegar. Paling tidak, ustadz diharapkan memiliki tujuh

karakter berikut ini, agar bisa tegar menghadapi realitas medan dakwah yang kadang terasa sangat keras perbenturannya. Pertama, *atsbatu mauqifan*, ustadz harus menjadi orang yang paling teguh pendirian dan paling kokoh sikapnya.

Pertama At-Tsabat (keteguhan) adalah *tsamratus shabr* (buah dari kesabaran). Sebagaimana firman Allah, “*Famaa wahanuu lima ashabahum fii sabiilillahi wamaa dha’ufu wamastakanu*”. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Keteguhan itu membuat tenang, rasional, obyektif dan mendatangkan kepercayaan Allah untuk memberikan kemenangan.

Kedua, arhabu shadran, ustadz harus menjadi orang yang paling berlapang dada. Medan dakwah sering kali membuat hati sempit. Banyak kata-kata ejekan, cemoohan, caci maki, sumpah serapah yang terlontar begitu saja dari banyak kalangan. Ustadz tidak boleh bersempit hati dan sesak dada karena caci maki orang dan karena beritaberita di media massa yang sering kali mendiskreditkan tanpa konfirmasi dan pertanggungjawaban.

Ketiga, a’maqu fikran, ustadz harus menjadi orang yang memiliki pemikiran paling mendalam. Kader haru selalu berusaha mendalami apa yang terjadi, tidak terlarut

pada fenomena permukaan, tetapi lihatlah ada apa hakikat di balik fenomena tersebut. Jika pemikiran kader bisa mendalam, ketika merespon pun akan lebih obyektif, terukur, dan seimbang.

Keempat, ausa'u nazharan, ustadz harus menjadi orang yang memiliki pandangan luas. Cakrawala pandangan ustadz harus terus menerus diperluas, agar tidak mengalami gejala kesempitan cara pandang. Membaca realitas dengan pandangan yang luas akan membawa kader kepada sikap adil dan moderat. Tidak terjebak kepada sikap-sikap ekstrim dan berlebih-lebihan.

Kelima, ansyathu amalan, ustadz harus menjadi orang yang paling giat dalam bekerja. Ustadz tidak boleh disibukkan dengan membantah isu-isu, atau mengcounter suara-suara negatif, karena itu tidak banyak membawa produktivitas. Yang lebih produktif adalah selalu bekerja di tengah masyarakat. Tunjukkan kerja nyata. Jika ada yang perlu direspon, boleh direspon sesuai kebutuhan, namun tetap harus giat bekerja untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

Keenam, ashlabu tanzhiman ustadz harus memiliki gerakan yang paling kokoh strukturnya. Sebagai jama'ah kumpulan manusia, pasti ada kekurangan dan kesalahan. Namun kewajiban kita adalah terus berusaha menghindarkan diri dari kesalahan dan kelemahan, sambil terus berbenah. Struktru dakwah harus terus menerus

dikokohkan dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ke ranting. Jangan biarkan ada celah yang bisa digunakan untuk melemahkan struktur dakwah.

Ketujuh, aktsaru naf'an, ustadz harus menjadi orang yang paling banyak manfaatnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ustadz harus membuktikan bahwa keberadaan mereka di tengah kehidupan masyarakat memberikan banyak kontribusi kebikan. Tidak merugikan atau membuat keonaran, namun justru memberikan banyak kemanfaatan dan kebaikan.

Jika tujuh karakter itu dimiliki oleh para ustadz, niscaya lebih ringan dan mudah menghadapi tantangan dan hambatan di sepanjang jalan dakwah. Ustadz dan seluruh aktivitas dakwah akan semakin kokoh dan diterima masyarakat, dalam menghadirkan berbagai kebajikan yang diharapkan oleh umat, bangsa dan negara.

Pada masa depan, peran ustadz dalam dunia politik memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Dengan menggabungkan keahlian keagamaan dan kepemimpinan, ustadz dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat.

Selanjutnya dibalik tantangan-tantangan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, berikut diantara peluang Ustadz di dunia politik masa depan.

1. Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan sebagai Dasar Kepemimpinan

Ustadz, sebagai para pemimpin spiritual, memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai keagamaan yang dapat menjadi landasan bagi kebijakan politik yang lebih etis dan inklusif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam tindakan politik, ustadz dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan berkeadilan.

Pertama, seorang pemimpin harus memiliki kesamaan antara ucapan dan perbuatannya, kesamaan antara nasihat dan kebijakan-kebijakannya. Allah sangat tidak menyukai kepada tipologi manusia yang suka berbicara namun tidak ada hasil kerja dari yang diucapkannya, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat ash-Shaff ayat ke-61:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Lalu yang kedua, Ia mampu menepati janji.

Ketahuilah oleh kita sekalian bahwa karakter kepemimpinan senantiasa menepati janji ini merupakan perwujudan iman yang kuat dan budi pekerti yang agung,

dan sikap yang luhur dan terpuji, sehingga dapat melahirkan kepercayaan dan penghormatan Masyarakat kepadanya. Namun, sebaliknya perbuatan menyalahi dan mengingkari janji merupakan perwujudan iman yang lemah, perangai yang jelek dan sikap yang tidak memiliki nilai-nilai universal kemanusiaan. Dengan sipat yang bertolak belakang ini akan melahirkan saling curiga mencurigai, melahirkan dendam terhadap sesama anggota masyarakat.

Kepemimpinan dalam Islam harus mampu mencontoh kepemimpinan yang pernah ditampilkan oleh Rasulullah Saw., beliau berhasil menampilkan dan menerapkan manajemen kepemimpinan yang paripurna. Beliau menerapkankan dan mengedepankan teori kepemimpinan dengan berdasar kepada nilai-nilai shiddiq, tabligh, amanah dan fathanah. (Syarif Husain, 2021).

2. Pemersatu Umat Beragama

Ustadz yang terlibat dalam politik dapat berperan sebagai pemersatu umat beragama. Dengan mengedepankan dialog antaragama dan mempromosikan toleransi, mereka dapat membantu mengatasi konflik dan meningkatkan solidaritas di tengah-tengah masyarakat yang beragam keyakinan.

Semakin banyak tokoh agama yang mengambil peran dalam menjalankan politik, baik di legislatif, yudikatif, dan eksekutif, maka akan membawa dampak

yang lebih positif. Para pemuka agama baik Islam, Kristen, Katolik Budha dan lainnya, jika sudah bersatu dalam meramaikan politik aktif akan membawa kemaslahatan yang lebih besar (H. Abdul Waris Ahmad, 2019)

3. Menyuarakan Keadilan Sosial

Sebagai tokoh keagamaan, ustadz dapat menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar dalam masyarakat. Dengan mengadvokasi keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan hak asasi manusia, mereka dapat membantu menciptakan kebijakan yang memperjuangkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Keadilan sebagai salah satu prinsip etika politik dalam Islam mengajarkan bahwa memberikan hak kepada seseorang harus sesuai dengan porsinya, bukan atas dasar sama rata sama rasa. Politik juga harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat (Yusa Djuyandi, 2020).

4. Pembentukan Kepemimpinan yang Berakhlak Mulia

Ustadz dalam politik memiliki peran kunci dalam membentuk kepemimpinan yang berakhlak mulia. Mereka dapat memberikan panduan moral dan spirit yang dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Dengan menyadari peluang ini, ustadz dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam dunia politik. Mereka dapat membantu membentuk masyarakat

yang lebih berkeadilan, toleran, dan bermoral, sehingga mengarah pada pencapaian tujuan bersama untuk kebaikan bersama.

Pembentukan karakter menjadi perhatian yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi yang lebih baik. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan, membentuk, mencetak, pemimpin-pemimpin masa depan bangsa yang memiliki karakter-karakter yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang siap melayani dan berjuang untuk rakyat. Melalui pembentukan karakter kepemimpinan yang sejalan dengan nilai-nilai al- -generasi yang memiliki semangat kepemimpinan, generasi-generasi yang bertanggung jawab, disiplin, terpercaya, visioner, tidak mudah menyalahkan orang lain. Pembentukan karakter yang paling efektif adalah melalui proses pembiasaan, internalisasi nilai-nilai kebaikan sehingga itu menjadi watak, kebiasaan, karakter yang melekat dalam diri seseorang karena Karakter terbentuk dari akumulasi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seseorang yang kemudian itu mandarah daging sehingga sulit untuk dirubah. (Ahmad A, 2022).

Bagian 7

07 KESIMPULAN

Politik itu tergantung yang mengendalikan, baik buruknya muara politik di ujung pemegang kekuasaan itu bergantung pada sejauh mana cara pandang masyarakat umum dalam memaknai politik dan bagaimana keikutsertaan mereka dalam mengisi perannya dalam dunia politik. Karena pada dasarnya masyarakat memiliki andil yang sangat tinggi dalam menentukan masa depan yang dijumpai lewat jalan politik, dengan demikian seorang ustadz memiliki peran yang sangat penting dalam ranah ini, karena sebagai aktivis dakwah seorang ustadz mengemban amanah untuk terus mengajak dan juga menyeru masyarakat untuk berada di jalan-Nya begitupun dengan kajian politik. Ustadz Syehabuddin mengarahkan cara pandang masyarakat terhadap dunia politik, dengan berbagai keragaman cara pandang masyarakat membuat ustadz Syehabuddin mengemas proses dakwahnya sedemikian rupa agar dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, terlebih kajian mengenai politik bisa dikatakan memiliki sensitifitas yang tinggi.

Pembicaraan tentang hubungan dakwah dengan politik merupakan sesuatu yang amat penting, karena

keduanya merupakan faktor pendukung yang sangat diperlukan dalam rangka menuntun umat menuju tujuan hidupnya. Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, karena sejak zaman Rasul hingga para Sahabatnya, Islam memegang kendali untuk mengatur aspek kemasyarakatan dalam kehidupan keseharian. Bahkan saat itu, sebagai seorang Rasul atau Khalifah yang mengajarkan Islam kepada umatnya, Rasul dan Sahabat juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Hubungan erat antara Islam dan politik sebagaimana telah ditunjukkan dalam keterlibatan nyata umat Islam dalam urusan-urusan politik, bukan sekedar penjelmaan realitas sejarah tapi juga penjelmaan dari ketentuan agama. Maka keberagaman dalam memaknai politik di masa kini tentu bukanlah suatu hal yang baru, perbedaan cara pandang dan perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang muncul secara naluriah. Tapi dengan adanya perbedaan tersebut tentu saja tidak harus memunculkan pertikaian yang menimbulkan berbagai konflik, perkuat keimanan, perkuat tanamkan sikap toleransi, dan manfaatkan lah segala kesempatan keikutsertaan dalam dunia politik dengan baik. Karena islam adalah agama yang damai maka jalankan lah segala naik turun kehidupan ini dengan damai pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, (2011). *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Makassar: Alauddin University Press
- Abdullah Afandi, 2005. *Peran dan Fungsi Kiai (Studi Kasus di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen)*. Tesis tidak diterbitkan. Solo: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Abdullah, Irwan. (2013). "Islam, Politik, dan Moralitas: Studi Atas Pemikiran Politik Kyai NU." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 15(1).
- Abdullah, Taufik (Ed), *Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1979.
- Agustino, Leo. (2008). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad Azhar Basyir, (1993). *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman Seputar Filsafat Hukum, Politik, Ekonomi*, Penerbit Mizan, Cet I, Bandung.
- Ahmad Syafii Maarif, 1999. *Islam dan Politik, Upaya Membingkai Peradaban*. Cirebon: Pustaka Dinamika
- Ahmad, A. (2022). PEMBENTUKAN KARAKTER KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 5(1).

- Al-Faruqi, Jabir. (2000) *Ulama, Pemilu, dan Etika Politik*, Jakarta: Kompas.
- Arkoun, Mohammed, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagi Tantangan dan Jalan Baru*, Jakarta: INIS, 1994.
- Barton, G., & Fealy, G. (1996). "Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 152(2).
- Baudrillard, Jean, *Masyarakat Konsumsi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.
- Budiarjo, Mariam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi pesantren (edisi revisi)*, Jakarta: LP3ES, 2011.
- Dhume, Sadanand. (2005). "My friend, the imam." *Far Eastern Economic Review*, 168(6).
- Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/.
- Eveland. W.P. (1993). *Political Participation of the Elderly: The Influence of Community Structure*. University of Delaware,
- Fealy, G. (2009). "Islam-Christian Violence in Indonesia." *Journal of Islamic Studies*, 20(2).
- Fitria, R., & Abdulhakam, K. (2021). PENGARUH AGAMA TERHADAP PERILAKU MEMILIH PEMIMPIN PADA

GENERASI MUDA DIKOTA BANDUNG. *BUANA ILMU*, 5(2).

Freire, Paulo. (1998). *Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers

Hafied Cangara, (2009). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hamayotsu, K., & Akhadi, M. (2010). *"Islam and nation in Southeast Asia: Malaysia and Indonesia in comparative perspective."* Routledge.

Hefner, R. W. (2011). *"Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World."* Indiana University Press.

Horikoshi, Hiroko, (1990). *Ustadz dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M,.

Idin Rosyidin, (2004). *Hubungan Ulama-Umara di Indonesia: Studi Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Jalaluddin. (2010). *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jonge, Huub de and Elli touwen Bouwsma (1995), *Across Madura Strait: The Dinamic of an insular society*, Leiden: KITLV.

Kusnawan, A., Sambas, S., & Muhtadi, A. S. (2004). *Berdakwah Lewat Tulisan*.

- Laffan, M. F. (2003). *"Islamic nationhood and colonial Indonesia: The umma below the winds."* Routledge.
- Lauer, Robert H., (1993). *Perspektif tentang perubahan social,* Jakarta: Renika Cipta.
- Liddle, R. W. (2001). "Indonesia's elections: A constitutional revolution." *The Journal of Asian Studies*, 60(4).
- M. Din Syamsuddin, (2001). *Islam dan Politik, Era Orde Baru.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- M. Qurais Shihab (2001). *Membumikan Al-Qur'an.* Bandung: Mizan
- Majid Tehranian (1993). *Teori Komunikasi dan Perspektif Islam. (Dalam Wimal Dissanayake, pnyt. Teori Komunikasi Perfektif Asia).* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Martono, Nanang, (2014) *Sosiologi Perubahan Sosial,* Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhtadi, AS. (2004). *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif.*
- Muhtadi, B. (2018). *"Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism."* Cambridge University Press.
- Muis dan Abdul Andi. (2001). *Komunikasi Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nahrawi, Amiruddin, (2008) *Pembaharuan Pendidikan Pesantren,* Yogyakarta: Gama Media.

- Nina Yudha Aryanti, (2008). Peranan Opinion Leader Dalam Meningkatkan Peran Politik Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Dinamika*. 1 (1).
- Nuruddin. (2004). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rahmat. (1999). *Efektivitas Berkomunikasi dalam Islam*. Cet. I. Bandung: Mizan.
- Said Gatara A.A. dan Dzulkiah Said, Moh. 2007. *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia
- Sarbini, Ahmad, *Kajian Dakwah Mutiperspektif, Teori, Metodologi, Problem dan Aplikasi*, Bandung: Rosdakarya, 2014.
- Siagian, H. F. (2013). Partisipasi dan efek komunikasi pemuka pendapat dalam pembangunan. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 14(1).
- Syaifullah, (1997). *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Teuku May Rudy, 2005. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Turmudi, E. (2003). *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*.
- Usman, Ali, (2013). *Ustadz Mengaji Santri Acungkan Jempol*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Usman, Sunyoto, (2015) *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Veeger, K. J., (1993). *Realitas Sosial :Refleksi Filsafat Atas Hubungan Individu Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Yayan Nurbayan. (1999). *Karakteristik Ulama menurut Al-Hadits (Kajian Tematik atas Hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan Karakteristik Ulama)*. Makalah tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah
- Zen, H. R. (2017). Politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah. *Al-'Adalah*, 12(1).

DOKUMENTASI



PROFIL PENULIS



Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si.

Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya “Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan” dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi dengan mahasiswa Prodi S2 Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2023 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Komunikasi Politik Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat

di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari pihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu: Komunikasi Politik: Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu: Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Buku ke 3, yaitu Komunikasi Kebijakan Pendidikan di terbitkan oleh Jakad Media Surabaya pada tahun 2021.

Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdikan selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia: Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun facebook dengan alamat cecep suryana Majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.



Sri Nur Hasanah, S.Sos. panggilan (Nci), Lahir di Kuningan 15 Oktober 1999. Perjalanan Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, SMA Negeri 1 Cigugur Kuningan Jurusan IPA, SMP Negeri 1 Subang Kuningan, SD Negeri 1 Jatisari Kuningan, dan TK PGRI Desa jatisari, sekarang sedang melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Kegiatan diluar Kuliah yaitu Di Pondok Pesantren Al-Faqih Dua Bandung, menjadi tenaga pendidik di salahsatu Yayasan Nurul Amanah, dan Bimbel Techno-G sebagai Administtrasi Keuangan. Menjalani pendidika sekaligus tinggal di Pondok pesantren sekaligus bekerja bukanlah sesuatu yang mudah, tapi banyak sekali warna yang dirasakan dan terlihat sekaligus banyak moment yang terasa.

Baik dari lingkungan social dan lainnya. Sekaligus seorang anak yang jauh dari kedua orantua itu sangatlah sulit tapi percayalah itu menajdi suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya tempat yang kita tinggal sekarang merupakan amanah, semua yang kita laksanakan itu amanah dan sebuah kepercayaan bahwasannya kita mampu melakukannya dengan baik. Berbicara mengemban amanah tidaklah mudah pasti banyak sekali hasutan dari kanan kiri kita, khususnya di dunia politik, ketika kita terjuna kedalam ranah politik jadilah penggerak politik yang tidak merugikan siapapun baik diri sendiri keluarga bahkan masyarakat. Politik itu banyak sekali pandangannya baik dari akademisi seperti mahasiswa, masyarakat kota maupun desa bahkan di linkup kiyai pesantren dan santrinya.

Satu Pesan dari saya pribadi :

“Politik itu indah jika ada ditangan orang yang tepat, politik akan terasa baik jika yang menjalankannya orang baik. Sesorang akan mengambil sesuatu keburukan dan kebaikan karena ada kesempatan jauh dari kata mau atau tidaknya” oleh karena itu jangan berikan kesempatan buruk datang kepadmu luaskanlah kesmepatan positif supaya semua yang kita jalani itu berjalan fiddunya wal akhirat”



Eful Saefullah Nurul Fahmi S.Pd, lahir pada 15 Rajab 1411 H, atau tepatnya 31 Januari 1991, di Perumahan guru Desa Jayamekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Sebagai seorang pegiat literasi, Ia telah menempuh perjalanan pendidikan yang beragam untuk membentuk dan mengembangkan keilmuannya.

Ia telah menyelesaikan pendidikan pondok pesantren di Al Munawwaroh Ciloa Limbangan Garut dan pondok pesantren Albarokah Parigilame Bandung barat. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan formal di SDN Cidomas cibugel Sumedang, SMP Plus Ciloa Limbangan Garut, MA Sunan Rahmat Limbangan Garut , hingga memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Indonesia dengan program studi Bahasa Arab dari Universitas Pendidikan Indonesia.

Perjalanan pendidikannya belum berakhir, karena saat ini Ia sedang menyelesaikan studi pascasarjana di Universitas Islam Negeri Bandung dengan program studi Komunikasi Penyiaran Islam.

Sejak tahun 2016, Ia mendapat amanah sebagai Penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Serta sebagai Penyuluh Informasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Aktivitasnya tidak hanya terbatas pada dunia pemerintahan, karena ia juga berperan sebagai pengajar di MTs Assarfah Cibugel Sumedang, menjabat sebagai kepala sekolah PAUD Taam Asshalih Cibugel Sumedang, dan aktif sebagai ketua FKDT Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah Kecamatan Cibugel.

Selain melibatkan diri dalam bidang pendidikan, Eful Saefullah Nurul Fahmi juga memperluas dampak positifnya melalui keterlibatannya sebagai Pendamping proses produk halal di BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) UIN Sunan Gunung Djati.

Ia juga terlibat dalam kegiatan sosial dan olahraga di masyarakat, menjadi Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kecamatan Cibugel. Selain itu, ia menjabat sebagai Sekretaris Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Cibugel dan Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Desa Jayamekar.

“Kekuasaan dalam politik adalah amanah dari Allah; tanggung jawab untuk mengelolanya dengan bijak adalah bentuk ibadah.”



Deri Husen Abdullah, S.Pd. lahir pada 16 Juli 1990 di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Deri sejak kecil sudah terbiasa hidup di lingkungan Pesantren, di tahun 2000 Ia sudah mulai mondok di beberapa Pesantren di Tasikmalaya dimulai dari level Pendidikan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyyah PERSIS 46 Cibitung Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya di tahun 2002 di level Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah Ia kembali mondok di Pesantren PERSIS 79 Rajapolah, kemudian di tahun 2005 Ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas atau biasa dikenal juga dengan Madrasah Aliyah/Muallimin di Pesantren PERSIS 182 Rajapolah Kab. Tasikmalaya. Tidak berhenti disana, tepat di penghujung tahun 2014 akhirnya Gelar Sarjana (S1) Pendidikan Bahasa Inggris dengan Program Studi Pendidikan dan Keguruan berhasil diraih olehnya di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PERSIS Bandung.

Perjalanan pendidikannya belum berakhir, saat ini Ia sedang menyelesaikan studi Pascasarjana (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam.

Sejak mengenyam Pendidikan di level SMP/Madrasah Tsanawiyah, Ia sudah aktif dan banyak terlibat dalam kegiatan Organisasi, dimulai

menjadi Ketua OSIS, sampai akhirnya di level Sekolah Tinggi/Universitas Ia diamanahi sebagai Presiden Mahasiswa (Ketua BEM), Jam terbangnya di Organisasi terbilang sangat tinggi karena Ia terlibat di beberapa Organisasi dimulai dari Organisasi Mahasiswa seperti HIMA PERSIS, juga di Organisasi Kepemudaan seperti Gerakan Pemuda Islam (GPI) dan Pemuda PERSIS di Kota Bandung, puncaknya saat Ia ditunjuk sebagai salah satu Pengurus Pimpinan Pusat Organisasi Jabar Bergerak binaan Atalya Praratya Ridwan Kamil Ibu Gubernur Jawa Barat pada periode 2018 – 2023.

Selain terlibat dalam kegiatan Organisasi, Ia juga sangat aktif dalam kegiatan Organisasi Filantropi Kemanusiaan, sejak tahun 2010 Ia sudah menjabat sebagai Kepala Departemen Fundraising di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa Jawa Barat, kemudian melanjutkan karir di LAZNAS Pusat Zakat Umat (PZU) di tahun 2018, dan pada puncaknya di Tahun 2020 sampai sekarang Ia kini diamanahi sebagai Kepala Departemen HUMAS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.

“Dalam politik, tidak ada musuh abadi atau teman abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Maka pastikanlah kepentingannya itu adalah untuk Kebaikan”.



Hikmat Maulana, S.Ag. Lahir di Sukabumi, 2 Mei 1997, anak ke 1 dari 3 bersaudara anak dari pasangan ibu Oom dan bapak Sunendi. Latar Belakang Pendidikan Formal SD Negeri 3 Cimaja, MTs Nurul Faizah, MAN Palabuhanratu, S1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, dan S2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Program Studi

Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pendidikan Non Formal, Madrasah Diniyah Nurul Hasanah, Pondok Pesantren Nurul Faizah, Pondok Pesantren Al-Qudsiyah Palabuhanratu, Pondok Pesantren

Bustanul Wildan Bandung, Pondok Pesantren Miftahul Falah Bandung. Penulis Aktif juga di berbagai organisasi, salah satunya sebagai Founder FOMAKSI Sukabumi, Pengurus BKPRMI, Pengurus HMJ IAT UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Sebagai Ketua Bidang Syarhil Qur'an UPTQ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ketua Departemen Kajian Al-Qur'an UPTQ UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan penulis aktif juga sebagai tenaga pendidik di YPDM Bakti Nusantara 666, Sekaligus sebagai Owner HM Grup. Menjalani pendidikan dan tinggal di Pondok Pesantren sambil bekerja merupakan tantangan yang tidak mudah. Namun, di tengah kesulitan tersebut, kita bisa merasakan dan melihat banyak warna kehidupan yang menarik, serta mengalami berbagai momen yang berkesan. Selain itu, kita juga bisa berinteraksi dengan berbagai lingkungan sosial yang berbeda. Sebagai seorang anak yang jauh dari orang tua, tentunya tidaklah mudah. Namun, percayalah bahwa keputusan ini adalah yang terbaik karena tempat kita tinggal sekarang merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Segala aktivitas yang kita lakukan di sana adalah amanah dan merupakan kepercayaan bahwa kita mampu melakukannya dengan baik.

Namun, membawa amanah bukanlah perkara yang mudah. Kita pasti akan dihadapkan dengan godaan dan hasutan dari berbagai arah, terutama dalam dunia politik. Ketika kita terjun ke ranah politik, kita harus menjadi penggerak yang tidak merugikan siapa pun, baik itu diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada banyak pandangan mengenai politik, baik dari akademisi seperti mahasiswa, masyarakat kota maupun desa, serta dari para kiyai dan santri di pondok pesantren. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami berbagai pandangan tersebut untuk menjadi penggerak politik yang baik dan bertanggung jawab.

USTADZ

Melintasi Dunia Politik

Sepakat Untuk Tidak Sepakat

Buku ini menggambarkan suatu perspektif yang mendalam tentang hubungan antara politik, masyarakat, dan peran seorang ustadz dalam mengarahkan pandangan serta partisipasi masyarakat dalam dunia politik. Kesimpulan utama dari buku ini adalah bahwa politik memiliki muara yang dapat baik atau buruk tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Pemegang kekuasaan memiliki peran krusial dalam membentuk arah politik, namun sejauh mana politik membawa dampak positif atau negatif juga tergantung pada cara pandang masyarakat terhadap politik.

Penulis menjabarkan pandangan Ustadz Syehabuddin yang menekankan bahwa masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan masa depan politik. Oleh karena itu, sebagai seorang ustadz, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk terus mengajak dan menyeru masyarakat agar terlibat aktif dalam politik. Dalam konteks dakwahnya, ustadz ini berusaha merubah cara pandang masyarakat terhadap dunia politik dengan memahami mereka melalui kajian politik yang disajikan dengan beragam pendekatan.

Buku ini membahas upaya Ustadz Syehabuddin dalam mengemas proses dakwahnya agar dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Karena politik memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, kajian politik yang diajarkan oleh ustadz ini dirancang untuk memahami dan meresapi nilai-nilai keislaman, sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui pendekatan ini, buku ini mengajak pembaca untuk merenung tentang peran krusial masyarakat dalam membentuk politik dan bagaimana seorang ustadz dapat menjadi penghubung antara nilai-nilai agama dan realitas politik yang dihadapi oleh masyarakat.



Gunung Djati Publishing

Gunung Djati Publishing

Jl. A.H. Nasution No.105. Cibiru, Banduna 40614 Lecture Hall Banduna



9 786235 485775